

**PENGARUH GERAKAN HINDUVTA TERHADAP HUBUNGAN
BILATERAL INDIA-PAKISTAN ERA KEPEMIMPINAN
NARENDRA MODI (2014-2022)**



SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program

Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Bosowa

Oleh:

Feby Melati Sukma

4519023069

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini:

Judul : Pengaruh Gerakan Hinduva Terhadap Hubungan Bilateral India-Pakistan Era Kepemimpinan Narendra Modi (2014-2022)

Nama Mahasiswa : **Feby Melati Sukma**

Nomor Stambuk : **4519023069**

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 27 September 2023

Menyetujui,

Pembimbing I



Muh. Asy'ari, S.IP., MA

NIDN. 0908088806

Pembimbing II



Arief Wicaksono, S.IP., MA

NIDN. 0927117602

Mengetahui,

Dekan FISIP

Universitas Bosowa Makassar



Dr. A. Burcharuddin, S.Sos., M.Si

NIDN. 0905107005

Ketua Jurusan

Ilmu Hubungan Internasional



Muh. Asy'ari, S.IP., MA

NIDN. 0908088806

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dengan Judul Skripsi **Pengaruh Gerakan Hinduvtta Terhadap Hubungan Bilateral India-Pakistan Era Kepemimpinan Narendra Modi (2014-2022)**

Nama : Feby Melati Sukma
Nomor Stambuk : 4519023069
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubunga Internasional.

Makassar, 27 September 2023

Pengawas Umum:


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si

Panitia Ujian:


Muh. Asy'ari, S.IP., MA

Ketua


Arief Wicaksono, S.IP., MA

Sekretaris

Tim Penguji:

1. Muh. Asy'ari, S.IP., MA
2. Arief Wicaksono, S.IP., MA
3. Zulkhair Burhan, S.IP., MA
4. Dr. Rosnani, S.IP., MA


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Feby Melati Sukma
Nomor Stambuk : 4519023069
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Pengaruh Gerakan Hinduvta Terhadap Hubungan Bilateral India-Pakistan Era Kepemimpinan Narendra Modi (2014-2022)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa dapat paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar, 23 Oktober 2023

Penulis



Feby Melati Sukma

ABSTRAK

Hinduvta merupakan sebuah ideologi politik yang mendukung supremasi Hindu di India yang bertujuan untuk mengubah India sebagai Negara sekuler menjadi Negara etno-Nasionalis (Nasionalisme Etnik). Kebangkitan politik Hinduvta di India dimulai sejak *Partai Bharatiya Janata* (BJP) yang merangkul ideologi Hinduvta mengambil alih pemerintah pusat India pada tahun 2014. Sebagai sebuah ideologi, Nasionalisme Hindu (Hinduvta) secara dramatis telah mengubah politik India dan mengatur bagaimana India dalam merespon negara-negara tetangga, khususnya Pakistan dengan bantuan Narendra Modi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh gerakan Hinduvta terhadap hubungan bilateral India-Pakistan pada era kepemimpinan Narendra Modi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data *library research* (telaah pustaka). Analisis dalam penelitian ini menggunakan dua konsep, yaitu konsep hubungan bilateral dan juga konsep ideologi politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya gerakan hinduvta sebagai sebuah ideologi politik di India telah membawa ketegangan yang lebih serius terhadap hubungan bilateral India dan Pakistan.

Kata Kunci: *Hinduvta, Ideologi Politik, Hubungan Bilateral.*

ABSTRACT

Hinduvta is a political ideology that supports Hindu supremacy in India which aims to transform India as a secular state into an ethno-Nationalist State (Ethnic Nationalism). The revival of hinduvta politics in India began since the Bharatiya Janata Party (BJP) which embraced the hinduvta ideology took over the central government of India in 2014. As an ideology, Hindu Nationalism (Hinduvta) has dramatically changed Indian politics and governed how India responds to neighboring countries, especially Pakistan with the help of Narendra Modi. Therefore, this study aims to find out how the influence of the hinduvta movement had on India-Pakistan bilateral relations during the era of Narendra Modi's leadership. This study uses descriptive qualitative research methods with library research data collection techniques (Telaah Pustaka). The analysis in this study uses two concepts, namely the concept of bilateral relations and also the concept of political ideology. The results of this study indicate that the emergence of the Hinduvta movement as a political ideology in India has brought more serious strains on the bilateral relations between India and Pakistan.

Keywords: *Hinduvta, Political Ideology, Bilateral relations.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada **Allah SWT** yang telah memberi kesehatan, berkat, rahmat, dan juga karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini, yang berjudul **“Pengaruh Gerakan Hinduvta Terhadap Hubungan Bilateral India-Pakistan Era Kepemimpinan Narendra Modi (2014-2022)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa, Makassar. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengalami banyak kendala dan halangan sehingga penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan dukungan serta arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dan juga selama penulis menjalani masa perkuliahan, yaitu kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, ridho, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan hingga akhir dan memberikan kelancaran dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat dan menjadi suri

tauladan bagi seluruh umatnya.

3. Yang teristimewa, Ibunda Nuraeni tercinta, sosok wanita hebat yang tiada henti-hentinya melangitkan do'a, memberikan kasih sayang, motivasi, dan dukungan yang tak terhingga untuk kelancaran putrinya dalam menempuh pendidikan. Terimakasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis. *I love you infinity and beyond.*
4. Yang tidak kalah istimewanya, cinta pertama dan panutan penulis, Alm. ABD Muin Arief, seseorang yang selalu saya panggil bapak. Terimakasih untuk setiap do'a tak terpusus yang selalu dilangitkan, juga untuk semua cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis. Terimakasih telah menjadi panutan dalam setiap langkah penulis. *I love you to the moon and back a million times forever and ever, and I miss you to infinity and beyond.*
5. Keempat saudara-saudara tersayang penulis, Sandi Eka Prasetya, Sandra Eko Harisaputra, Tri Yudha Dharma Putra, dan Resky Ervina Ary Handayani. Juga kepada seluruh keluarga besar penulis. Terimakasih untuk segala do'a dan dukungan, baik secara moril maupun material yang telah diberikan kepada si bungsu ini.
6. Bapak Muh. Asy'ari, S.IP., MA. selaku pembimbing I sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dan bapak Arief Wicaksono, S.IP., MA. selaku pembimbing II. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan penulis serta membimbing penulis dengan ikhlas dan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Bapak Zulkhair Burhan, S.IP., MA. dan Ibu Dr. Rosnani, S.IP., MA. selaku penguji I dan penguji II. Terimakasih telah memberikan saran, masukan, dan arahan kepada penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Program studi Ilmu Hubungan Internasional. Terimakasih untuk semua ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
9. Seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terimakasih telah membantu segala pengurusan administrasi penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
10. Lembaga kemahasiswaan, HIMAHI dan FPCI Chapter Universitas Bosowa. Terimakasih telah menjadi wadah bagi penulis dalam belajar dan mengembangkan diri.
11. Kakak rasa bestie, Infak Purnamasari dan Nurul Izmi yang selalu menjadi teman bertukar pikiran dan tempat berkeluh kesah bagi penulis. Terimakasih untuk segala motivasi dan dukungan yang tiada hentinya diberikan kepada adik ini. Terimakasih juga untuk bocil, Muhammad Bilal yang selalu menjadi *Mood Booster* dan *support system* terbaik bagi penulis.
12. My Bestie, Nuraini Vanira dan Putri Allodia. Terimakasih karena selalu kebersamai penulis dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka, selalu menjadi bagian dalam berbagi cerita, dan juga terimakasih untuk setiap do'a dan support yang diberikan kepada penulis.
13. Teman-teman *Deep Talk*, Sarah, Rahmat, dan Rida, yang hingga saat ini tidak pernah berhenti untuk menyemangati, mendukung, mendengarkan, dan

menghibur penulis.

14. Seluruh teman-teman HI 19 yang telah bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi.
15. Member EXO, Byun Baekhyun, Kai, Suho, Chanyeol, D.O, Xiumin, Lay, Chen, Sehun, serta NCT DREAM dan SEVENTEEN, yang telah memberikan inspirasi, motivasi, dan kebahagiaan kepada penulis melalui karya-karyanya.
16. *Last but not least*, terimakasih untuk diri sendiri. Terimakasih sudah mau diajak berkompromi atas segala keadaan yang tidak menyenangkan. Terimakasih sudah bersedia untuk tetap berusaha, meskipun sudah tau bahwa yang dihadapi adalah hal yang begitu berat. Terimakasih untuk selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja. Terimakasih telah memilih untuk tidak menyerah, disaat ada pilihan untuk menyerah. Terimakasih telah bertahan hingga saat ini dan telah begitu yakin untuk mampu sampai di tahap ini, mungkin belum sehebat orang lain *but I'm still proud of myself for trying my very best. It's hard but a nice try.*

Skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa depan. Akhir kata, penulis sangat berharap skripsi ini dapat berguna bagi setiap pembaca. Terimakasih.

Penulis

Feby Melati Sukma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
HALAMAN PENERIMAAN	III
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	IV
ABSTRAK	V
ABSTRACT	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR GAMBAR.....	XIII
DAFTAR TABEL.....	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Metode Penelitian	17
G. Rancangan Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM.....	20
A. Sejarah Hubungan Bilateral India dan Pakistan	20
B. Nasionalisme Hindu (Hinduvta) di India	29
C. Hubungan Bilateral India Era PM Modi.....	34
BAB III PENGARUH GERAKAN HINDUVTA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDIA-PAKISTAN ERA PM MODI	39
A. Meningkatnya Sentimen Anti-Pakistan	41
1. Meningkatnya Aksi Protes dan Demonstrasi Sentimen Anti- Pakistan.....	43
2. Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Alat penyebaran Sentimen	

Anti-Pakistan.....	44
3. Penggunaan Sentimen Anti-Pakistan dalam Gagasan Politik India	45
B. Munculnya Kebijakan Diskriminatif	48
C. Meningkatnya Ketegangan di Wilayah Sengketa Jammu dan Kashmir	54
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pemisahan British India pada Tahun 194721



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Bilateral India-Pakistan Tahun 1947-2012	25
Tabel 2	Undang-Undang Terkait Penyembelihan dan Kepemilikan Daging Sapi	49
Tabel 3	Undang-Undang Kebebasan Beragama di India Era Narendra Modi	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemisahan *British India* pada tahun 1947 tidak hanya membawa kemerdekaan bagi India dan Pakistan, tetapi juga membawa ideologi politik keagamaan yang mendasarinya. India dan Pakistan mempertahankan identitas agama dan budaya mereka secara terpisah. India membawa identitas dengan populasi mayoritas Hindu dan Pakistan membawa keyakinan Islam sebagai identitasnya (Azam & Khan, 2022:25).

Pada tahun 2014 hubungan konfliktual India dan Pakistan semakin memburuk dengan terpilihnya Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India dan munculnya *Partai Bharatiya Janata* (BJP) yang membawa ideologi Hinduvta. BJP memiliki komitmen untuk mengubah India menjadi *Hindu Rashtra* (Negara Hindu) (Farooq, 2021).

Hinduvta merupakan ideologi hindu yang diwakili oleh *Partai Politik Bharatiya Janata* atau Partai Rakyat India (BJP) dan juga merupakan ideologi dari badan budaya yang dikenal sebagai *Rashtriya Swayamsevak Sangh*, atau *National Volunteer Core* (RSS) yang didirikan pada tahun 1925 dan juga memiliki hubungan yang kuat dengan partai BJP (Sharma, 2020).

Partai BJP didirikan atas dasar Hinduvta yang membangun seorang Hindu yang ideal sebagai warga negara India yang khas. Hinduvta membayangkan India untuk selalu menjadi negara Hindu, dan Muslim

dipandang sebagai sebuah kekuatan asing yang akan mengancam India melalui perang dan invasi (OHCHR, 2020). Hinduvta pertamakali diajukan sebagai sebuah ide politik pada tahun 1928 melalui sebuah pamflet yang berjudul “*Hinduvta: Who is a Hindu?*” yang ditulis oleh Vinayak Damodar Savarkar (Khrishnan, 2022).

Hal tersebut kemudian melahirkan kelompok yang melindungi kepentingan Hindu dan melawan umat Muslim, seperti Hindu Mahasabha atau *Rashtriya Swayamsevak Sangh* (RSS). RSS merupakan sebuah organisasi bersenjata paling agresif dan berbahaya yang didirikan atas dasar Hinduvta. RSS tidak hanya menyebarkan ideologinya di masyarakat, tetapi juga memberikan pelatihan militer di India. Semuanya berjalan baik bagi RSS hingga Mahatma Gandhi berkuasa. Mahatma Gandhi merupakan seorang pemimpin yang berjuang untuk menjalin hubungan yang baik dengan Pakistan dan Muslim. Oleh karena itu, seorang anggota RSS membunuh Mahatma Gandhi yang kemudian menimbulkan kerusuhan besar-besaran antara umat Hindu dan Muslim, dan membuat hampir satu juta orang kehilangan nyawa (Duzgun, 2022).

Setelah pembunuhan dan kerusuhan tersebut, RSS dan pengikutnya menghilang dan mulai muncul kembali di tahun 50-an, penindasan yang dialami oleh RSS dan pengikutnya karena kematian Mahatma Gandhi membuat mereka mulai terjun ke dunia politik dengan Partai *Bharatiya Jana Sangh* (BJS). Kemudian pada tahun 1980-an, BJS bergabung dengan partai lain dan membentuk *Partai Bharatiya Janata* (BJP). Modi sendiri merupakan

anggota RSS yang ditugaskan oleh RSS ke BJP (Duzgun, 2022). Oleh karena itu, jauh sebelum Modi menjadi Perdana Menteri, konflik yang berkaitan dengan ideologi Hindutva telah mewarnai politik dalam negeri India.

Eskalasi konflik yang terkait dengan Hindutva di India merujuk pada meningkatnya ketegangan, perbedaan, dan juga konfrontasi yang terjadi dalam masyarakat India sehubungan dengan paham Hindutva sebagai sebuah konsep politik yang menekan identitas Hindu dan upaya untuk mengubah India sebagai negara dengan mayoritas pemeluk agama Hindu. Meskipun akhirnya telah ada sejak awal abad ke-20, namun konflik yang lebih signifikan terkait Hindutva muncul dalam beberapa periode berbeda.

Pada tahun 1990-an konflik yang melibatkan Hindutva dapat terlihat dari penghancuran Masjid Babri oleh para aktivis Hindu pada tahun 1992, dimana kelompok Hindu mengklaim situs tersebut sebagai tempat kelahiran dewa Rama. Tindakan ini merupakan puncak dari kampanye panjang kemarahan umat Hindu terhadap tetangga Muslim mereka, yakni Pakistan. Karena pemisahan kedua negara di masa lalu. Pasca serangan ini, kerusuhan antar agama melanda beberapa kota di India yang menewaskan lebih dari seribu orang, dimana korban tersebut sebagian besar adalah Muslim (Rhude, 2018).

Pada tahun 2000-an konflik yang melibatkan Hindutva terlihat dari kekerasan Gujarat (2002). Selama pemerintahan Modi di Gujarat, terjadi kekerasan komunal yang membunuh ribuan orang, terutama Muslim. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran tentang perlakuan yang tidak adil terhadap

kelompok minoritas agama dan tindakan yang tidak memadai dari pemerintah setempat dalam mengatasi kekerasan. Pasalnya, pada saat itu, Modi selaku ketua Menteri Gujarat diduga menginisiasi kekerasan tersebut. Polisi dan pejabat pemerintah juga diduga telah mengarahkan para perusuh dan memberikan daftar properti milik Muslim kepada mereka (*The Times of India*, 2023).

Kerusuhan tersebut memicu reaksi keras dari kancas Internasional, terkhusus Pakistan dan menimbulkan ketegangan bagi hubungan kedua negara. Pakistan menyatakan Modi memainkan peran aktif dalam pembunuhan Muslim yang membantunya memposisikan dirinya sebagai pemimpin masa depan partai nasionalis Hindu (*Arabnews*, 2023).

Ketegangan hubungan India dan Pakistan kemudian terlihat semakin memburuk ketika Modi terpilih sebagai Perdana Menteri di India Pada tahun 2014. Dimana sejak saat itu kasus-kasus kekerasan komunal antara Muslim dan Hindu lebih sering terjadi. Hal tersebut dipicu oleh isu-isu sensitif terkait keagamaan, seperti pertentangan terhadap konversi agama (*GharWapsi*), pemotongan sapi dan kontroversi terkait makanan, dan juga perubahan kebijakan terhadap minoritas agama.

Dalam politik dalam negeri India, partai BJP sangat mendukung nasionalisme Hindu yang juga dikenal dengan Hinduvta, yang mengesampingkan cita-cita sekularisme yang menjadi dasar konstitusi India (Kallimullah & Mahmood, 2019). Sejak Perdana Menteri Modi berkuasa. Nasionalis Hindu di India merasa diizinkan untuk melemahkan agama

minoritas (Muslim) yang ada di India (Azam, 2022). Terlepas dari kenyataan bahwa konstitusi India mengklaim melindungi hak-hak minoritas, nyatanya lembaga yang diisi oleh fasis hindu telah melanggar hukum dengan tidak mengambil tindakan apapun terhadap pelanggaran yang dilakukan kepada minoritas di India. Organisasi nasionalis hindu sayap kanan (VHP, RSS) juga telah menentang dan mengubah pembangunan sosial masyarakat India dengan memaksa minoritas Muslim, Kristen dan agama lain untuk kembali ke Hindu melalui program konversi agama “*GharWapsi*” (Pulang ke Rumah) (Azam, 2022).

Kebangkitan nasionalisme Hindu menimbulkan ancaman yang serius bagi perdamaian regional, karena intoleransi terhadap Muslim jelas telah melampaui lingkup domestik dan menuju lingkup eksternal (Kallimullah & Mahmood, 2019). Agenda Hinduvta telah mendominasi sebagian besar ruang publik di India dan juga mengambil bentuk kebijakan yang beresiko (Danziger, 2020). Khususnya terhadap Pakistan. Pada tahun 2019, BJP menjalankan kampanye untuk memproyeksikan Pakistan sebagai ancaman keamanan nasional yang utama. Pendekatan anti-Muslim yang dipengaruhi oleh Hinduvta juga terlihat di India (Kallimullah & Mahmood, 2019).

Michael Kugelman, wakil direktur program Asia dan senior Associate untuk Asia selatan di Wilson Center menyatakan bahwa pada tingkat diplomatik, Agenda Hinduvta yang semakin meningkat pada pemerintahan Modi telah merusak hubungannya dengan negara-negara tetangga, salah satunya adalah Pakistan. Penghapusan klausul konstitusional pasal 370 pada

tahun 2019 menjadi salah satu kasus yang sangat jelas. Penghapusan pasal ini sebagian besar didorong oleh pertimbangan nasionalis Hindu karena banyak pemimpin India yang menyatakan keinginan untuk menghapus pasal tersebut di masa lalu. Hubungan Hinduvta berakar pada fakta bahwa dengan terhapusnya klausul konstitusi maka jalan bagi orang India dari seluruh negeri untuk melakukan investasi dan memperoleh tanah di Kashmir akan terbuka. Pencabutan pasal ini akan menjerumuskan hubungan India dan Pakistan pada titik terendah baru (Iqbal, 2021).

Sejak terpilihnya Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India pada tahun 2014, hubungan India dan Pakistan sebagian besar ditandai dengan berbagai perpecahan politik dan diplomatik. Nuansa ideologi nasionalis Hindu tidak hanya terlihat secara luas pada sistem politik India, tetapi juga terhadap Pakistan secara khusus (Azam, 2022:31). Maka dari itu berdasarkan latar belakang ini, penulis akan menganalisa tentang bagaimana gerakan Hinduvta berpengaruh terhadap hubungan bilateral India dan Pakistan.

B. Rumusan Masalah

a. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan, Penulis akan memfokuskan penelitian pada pemahaman mengenai bagaimana gerakan Hinduvta berpengaruh terhadap hubungan bilateral India-Pakistan pada era kepemimpinan Narendra Modi Pada tahun 2014-2022.

b. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh gerakan Hinduvta di India terhadap hubungan

bilateral India-Pakistan era kepemimpinan Narendra Modi (2014-2022)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

Mengetahui bagaimana pengaruh dari gerakan hinduvta di India terhadap hubungan bilateral India-Pakistan era kepemimpinan Narendra Modi (2014-2022).

b. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi mahasiswa Hubungan Internasional.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan yang baru mengenai pengaruh yang dimiliki oleh gerakan hinduvta India terhadap hubungan bilateral India-Pakistan pada era kepemimpinan Narendra Modi (2014-2022).
3. Menambah daftar referensi di Perpustakaan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam menganalisa penelitian ini, penulis menyertakan beberapa literatur terdahulu sebagai sandaran dan bahan rujukan. Pada penelitian terdahulu, ada banyak penelitian yang membahas mengenai gerakan hinduvta yang ada di India. Namun, masih sangat minim dijumpai penelitian yang membahas tentang bagaimana pengaruh gerakan hinduvta terhadap hubungan bilateral India dan Pakistan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti

bagaimana pengaruh gerakan hinduvta terhadap hubungan bilateral India dan Pakistan dan mengumpulkan beberapa literatur/penelitian terdahulu yang sedikit banyaknya memiliki relevansi dengan topik penelitian penulis.

Pertama, sebuah skripsi yang ditulis oleh Nahla Wahdatan Nasrah Asy'Ary yang merupakan alumni Universitas Islam Indonesia dengan judul *"Pengaruh Gerakan Hinduvta Dalam Kebijakan Pemerintah India Terkait Persoalan Imigran Muslim (Studi Kasus Amandemen UU Kewarganegaraan Tahun 2019)"*. Tulisan ini menjelaskan bahwa India merupakan negara yang sangat kental dengan agama dan budaya, khususnya Hindu yang mempunyai kasta dalam kehidupan sehari-hari di India. Oleh karena itu, India menjadi negara yang kebijakannya dibuat berdasarkan budaya dan agama. Kehidupan sosial di India juga sangat bergantung pada Agama. Bahkan, komunitas-komunitas tertentu seperti Hinduvta kini keberadaannya dinilai sangat kejam karena pergerakannya terhadap muslim dan imigran muslim di India yang cukup kejam. Tidak hanya itu, Nahla juga menjelaskan bahwa sebagai ideologi negara India, Hinduvta memiliki tujuan utama untuk menjadikan India sebagai negara yang semua penduduknya beragama Hindu. Sebagai ideologi politik dan ideologi nasionalis keagamaan di India, Hinduvta memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pengambilan kebijakan di India. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan bahan rujukan ini adalah penulis lebih fokus tentang bagaimana pengaruh hinduvta terhadap hubungan bilateral India dan Pakistan.

Yang kedua, dari jurnal yang ditulis oleh Kalimullah dan Dr. Amma Mahmood dengan judul *"Role of Hinduvta in Modi's Foreign Policy Towards*

Pakistan". Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa sejak terpilihnya Narendra Modi sebagai Perdana Menteri, Kebijakan internal India mulai diarahkan oleh unsur-unsur agama guna memperkuat status India sebagai negara Hindu untuk konsumsi politik khalayak domestik di bawah rezim Modi. Dalam politik dalam negeri India, BJP di bawah pemerintahan Narendra Modi sangat mendukung Nasionalisme Hindu (Hinduvta) yang mengesampingkan cita-cita sekularisme yang menjadi dasar konstitusi India. Sedangkan dalam hubungan eksternal India, Modi berhasil tampil pragmatis dalam hubungannya dengan negara-negara di seluruh dunia, tetapi dalam kasus Pakistan, Modi selalu tampil ekstrimis. Oleh karena itu, permusuhan India terhadap Pakistan meningkat di tengah penguatan Nasionalisme Hindu di bawah pemerintahan PM Modi. Kalimullah dan Mahmood juga menuliskan bahwa Perdana Menteri Modi dalam masa jabatannya secara konsisten menghindari memperbaiki hubungan dengan Pakistan. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan bahan rujukan ini adalah penelitian dalam bahan rujukan ini lebih berfokus terhadap bagaimana peran Hinduvta dalam membangun kebijakan luar negeri India terhadap Pakistan, sedangkan penulis akan lebih fokus untuk melihat bagaimana pengaruh hinduvta berdampak pada hubungan bilateral India dan Pakistan.

Yang ketiga, dari thesis berjudul "*The Rise of Hinduvta in India: Effects on Pakistan-India Relations (2014-2019)*" yang ditulis oleh Muhammad Farooq. Dalam tulisannya, Farooq menjelaskan bahwa hubungan antiklimaks antara India dan Pakistan semakin memburuk dengan munculnya

Partai Bharatiya Janata (BJP) dan ideologi Hinduvta dari tahun 2014 hingga tahun 2019. BJP memulai sebuah kebijakan diskriminatif di dalam negeri terhadap Pakistan dengan tujuan untuk mengubah India menjadi *Hindu Rashtra*. Tidak hanya itu, dalam penelitiannya, Farooq mencoba untuk mengevaluasi dampak dari kebangkitan Hinduvta terhadap masyarakat India, populasi Muslim yang ada di India, dan juga hubungan India dan Pakistan. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan bahan rujukan ini adalah bahan rujukan ini memiliki fokus terhadap bagaimana dampak dari kebangkitan hinduvta terhadap hubungan India-Pakistan sedangkan penulis akan lebih fokus tentang bagaimana pengaruh dari gerakan hinduvta terhadap hubungan bilateral India dan Pakistan.

E. Kerangka Konseptual

Dalam memahami penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep dan pendekatan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang akan membantu peneliti dalam menganalisa masalah dan mendapat pemahaman yang lebih mendalam, yaitu konsep hubungan bilateral dan konsep ideologi politik.

a. Konsep Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral merupakan sebuah elemen pendiri dari hubungan internasional. Seperti yang dikemukakan oleh Thomas Gomart bahwa hubungan bilateral merupakan bentuk dasar dari permainan diplomatik (Ghomart, 2002). Hubungan bilateral merupakan hubungan antar negara yang mengacu pada ikatan politik, ekonomi, budaya dan sejarah.

Secara umum, hubungan bilateral merupakan hubungan kerjasama antara dua negara yang memiliki sifat saling menguntungkan dan didalamnya terdapat hubungan timbal balik dan pengaruh timbal balik masing-masing negara yang terlibat. Adapun pola kerjasama dalam hubungan bilateral meliputi (Perwita & Yani, 2005):

1. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara penginisiasi.
2. Persepsi pengambil keputusan negara penerima mengenai rangsangan dari negara penginisiasi.
3. *Feedback* atau aksi balik dari negara penerima keputusan.
4. Persepsi/tindakan pengambil keputusan dari negara yang menginisiasi.

Hubungan bilateral tidak lepas dari kepentingan nasional masing-masing negara yang mencakup keamanan, keutuhan wilayah dan kesejahteraan ekonomi. Dalam prosesnya, hubungan bilateral ditentukan oleh tiga motif, yaitu: Memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian dan juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi antar negara (Perwita & Yani, 2005). Struktur hubungan bilateral meliputi hubungan antara kepala negara dan/atau pemerintah, kedutaan besar, pemangku kepentingan swasta dan juga hubungan antara masyarakat sipil (Panner, 2020).

Dalam hubungan internasional, hubungan bilateral selalu berada dalam dua situasi yang berpotensi mengalami fase perubahan, yakni kerjasama dan hubungan konflikual (Panner, 2020).

1. Hubungan Kerjasama

Hubungan kerjasama merupakan hubungan yang terbentuk karena adanya kepentingan antara dua negara yang mendasari sebuah perjanjian yang memungkinkan kerjasama yang lebih besar dalam sektor-sektor tertentu. Kedekatan geografis dan volume pertukaran barang dan jasa yang cukup tinggi menjadi salah satu faktor yang sangat besar dalam terbentuknya sebuah kerjasama bilateral antara dua negara (Panner, 2020).

Hubungan Khusus juga menjadi salah satu faktor terbentuknya hubungan kerjasama. Hubungan Khusus yang dimaksud mengacu pada hubungan yang dianggap istimewa oleh masing-masing negara. Dimana kedua negara memiliki kedekatan budaya dan/atau sejarah bersama. Hubungan khusus merupakan bentuk hubungan kerjasama yang paling berhasil dalam sistem internasional. Karena, menjaga hubungan antara dua negara sudah dianggap sebagai bagian dari kepentingan nasional bukan semata-mata hanya karena kepentingan ekonomi atau keamanan (Panner, 2020).

2. Hubungan bilateral konfliktual

Hubungan bilateral konfliktual merupakan hubungan yang tidak kooperatif. Hubungan bilateral konfliktual ditandai dengan interaksi konflik yang beragam. Dalam kasus yang kurang ekstrim, hubungan bilateral konfliktual didasarkan pada persaingan ekonomi. Sedangkan dalam kasus yang paling tinggi, konflik cenderung menjadi

bagian integral dalam konsepsi hubungan, dimana konflik bukan hanya terjadi karena masalah politik, ekonomi, dan teritorial, tetapi juga karena representasi dari kelompok atau elit tertentu yang memandang pihak lain sebagai “Musuh” dan secara tidak langsung menjadi ancaman eksistensial. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran dan pandangan bahwa perbedaan pada kepentingan, budaya, ideologi dan identitas tidak dapat disatukan/didamaikan (Panner, 2020).

Situasi konflik antara dua negara cenderung bertahan apabila kerjasama dianggap rapuh. Namun, hubungan bilateral dapat berubah. Penyelesaian konflik antara dua negara dapat terjadi melalui mediator, baik itu dari organisasi internasional, mediator individu maupun negara ketiga (Panner, 2020).

Dalam mengaplikasikan konsep ini terhadap penelitian, penulis akan mencoba melihat lebih dalam mengenai hubungan India dan Pakistan. Seperti yang diketahui, bahwa India dan Pakistan merupakan dua negara di Asia Selatan yang berbagi hubungan linguistik, budaya, ekonomi dan geografis. Namun, kedua negara ini memiliki hubungan yang kompleks karena sejumlah peristiwa sejarah dan politik. Sejak terpilihnya Narendra Modi sebagai Perdana Menteri di India, gerakan hinduvta dan nuansa ideologi nasionalis hindu juga mulai terlihat secara luas dalam sistem politik di India. Hal ini, membuat hubungan India dan Pakistan terus ditandai dengan perpecahan politik dan diplomatik.

Konsep hubungan bilateral digunakan untuk menganalisis bagaimana hubungan bilateral suatu negara dan faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan bilateral antar negara. Oleh karena itu, konsep ini akan membantu penulis untuk melihat bagaimana hubungan bilateral India dan Pakistan, dan bagaimana gerakan hinduvta di India mempengaruhi hubungan bilateral antara dua negara tersebut.

b. Konsep Ideologi Politik

Ideologi politik merupakan seperangkat nilai, gagasan, norma, kepercayaan dan keyakinan yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang, dan berdasarkan itu pula mereka menentukan sikap terhadap peristiwa dan masalah politik yang mereka hadapi dan menentukan perilaku politik mereka (Budiardjo, 2003:32). Ideologi Politik menjelaskan tindakan atau rencana dalam merumuskan sebuah kebijakan publik sebagai upaya untuk membenarkan, menjelaskan atau mengubah tatanan sosial dan politik (Freedon, 2001).

Ideologi politik umumnya dianggap sebagai nilai atau perspektif politik, dimana ideologi politik hampir selalu dikaitkan dengan persaingan dan perebutan kekuasaan. Oleh karena itu, ideologi politik tidak dapat dipisahkan dari pandangan hidup yang mencakup pandangan dasar kelompok sosial-politik tentang kehidupan dan struktur masyarakat (Jurdi, 2016;02).

Ideologi juga didefinisikan sebagai kumpulan pandangan atau pemikiran tentang cara masyarakat seharusnya diatur dan kebijakan apa

yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Namun, Konsep ini sering kali kontroversial, dengan beberapa anggapan bahwa ideologi merupakan pemikiran yang salah dan tidak penting karena teori ideologi sering kali bersifat partisan, di mana kelompok politik berusaha mengkategorikan ide-ide orang lain sebagai sebuah ideologi. Terdapat pula beberapa pandangan tentang ideologi, termasuk pandangan bahwa itu adalah distorsi realitas yang diciptakan untuk kepentingan kelas sosial tertentu, sementara yang lain mengasosiasikannya dengan sistem pemikiran yang dianggap sebagai kebenaran mutlak (Adams, 2001).

Konservatisme tradisional sendiri cenderung memandang ideologi sebagai politik yang didorong oleh teori dan menganggap pendekatan ini tidak efektif dan berpotensi berbahaya. Mereka lebih suka pendekatan yang didasarkan pada pengalaman dan akal sehat. Namun, Dalam beberapa tahun terakhir, banyak anggapan yang mengartikan ideologi sebagai gabungan keyakinan politik tentang bagaimana masyarakat seharusnya menjadi dan melakukan perbaikan, tanpa mempertimbangkan apakah itu benar atau salah (Adams, 2001).

Politik melibatkan penyeimbangan pandangan yang bertentangan untuk mencapai keputusan bersama. Pertentangan ini muncul karena masyarakat memiliki kepentingan dan nilai-nilai yang berbeda. Ideologi merupakan kerangka pemikiran yang mengarahkan tindakan politik, menawarkan visi berbeda tentang masyarakat yang dianggap terbaik secara moral. Ideologi juga terkait erat dengan kegiatan politik praktis, di

mana politisi bisa memiliki pandangan yang berbeda terkait usulan kebijakan, tergantung pada nilai-nilai yang mereka pegang (Adams, 2001).

Setiap ideologi memiliki gambaran tentang cita-cita masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai mereka, dan hal ini tidak hanya berlaku untuk situasi tertentu, tetapi juga dianggap sebagai yang terbaik bagi umat manusia secara keseluruhan. Memiliki pandangan seperti ini juga berarti memiliki keyakinan tentang sifat manusia dan bagaimana mereka dapat mencapai potensi sejatinya. Oleh karena itu, ideologi memiliki peran penting dalam membentuk tatanan sosial dan politik. Masing-masing ideologi juga memiliki variasi dan sering kali berbeda satu sama lain (Adams, 2001).

Ideologi politik sendiri memusatkan perhatiannya pada bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu seharusnya digunakan (Jurdi, 2016:07). Dasar dari ideologi politik adalah keyakinan akan adanya model tatanan sosial politik yang ideal. Ideologi politik meliputi pembahasan dan diagnosis serta usulan dan saran-saran (*prescription*) untuk mencapai tujuan ideal tersebut. Ideologi berbeda dengan filsafat yang bersifat kontemplatif (merenung-renung), Ideologi memiliki tujuan untuk menggerakkan kegiatan dan juga aksi (*action-oriented*) (Budiardjo, 2003:32).

Ideologi yang berkembang luas selalu saja dipengaruhi oleh berbagai peristiwa dan pengalaman dalam masyarakat di mana ia berada, dan seringkali membuat kompromi dan perubahan yang cukup luas.

Adapun beberapa contoh dari ideologi politik yaitu Marxisme-Leninisme, Fasisme, Liberalisme, demokrasi, dan lain sebagainya (Budiardjo, 2001:32).

India sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki ideologi politik beragam dan mencakup berbagai spektrum, dari sekularisme hingga nasionalisme dan agama. Namun, salah satu ideologi politik yang sangat kontroversial dan saat ini mendominasi sistem politik di India adalah Hinduvta, yang merupakan ideologi politik yang memajukan nilai-nilai agama Hindu sebagai landasan masyarakat dan negara. Hinduvta merupakan sebuah ideologi politik yang dianut oleh partai politik yang saat ini berkuasa di India, yakni BJP. Hal inilah yang kemudian menghubungkan konsep Ideologi Politik dengan penelitian ini.

Dengan konsep Ideologi Politik penulis akan mencoba melihat bagaimana Hinduvta sebagai ideologi politik BJP yang saat ini tengah mendominasi sistem politik di India, yang kemudian menimbulkan ketegangan hubungan politik bilateral antara India dan Pakistan karena berbagai kebijakan dan tindakan yang dikeluarkan oleh India.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Kualitatif Deskriptif, merupakan penelitian yang mencoba untuk menggambarkan sebuah fenomena yang diteliti, sesuai dengan perspektif dan pandangan yang digunakan oleh peneliti untuk membenah fenomena. Serta, digunakan sebagai acuan dalam menggambarkan hasil dan

pembahasan yang akan menjawab pertanyaan “apa” dan “bagaimana” yang ada pada rumusan masalah.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sebuah data yang telah diolah atau dihasilkan oleh peneliti sebelumnya atau data yang telah disiapkan oleh lembaga-lembaga atau badan pemerintahan maupun swasta. Data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data dari hasil penelusuran perpustakaan dan dokumen-dokumen resmi lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Telaah Pustaka (*Library Research*), yaitu Teknik pengumpulan data dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur, buku, jurnal ilmiah, berita online, dokumen dan laporan resmi yang sesuai dengan masalah penelitian.

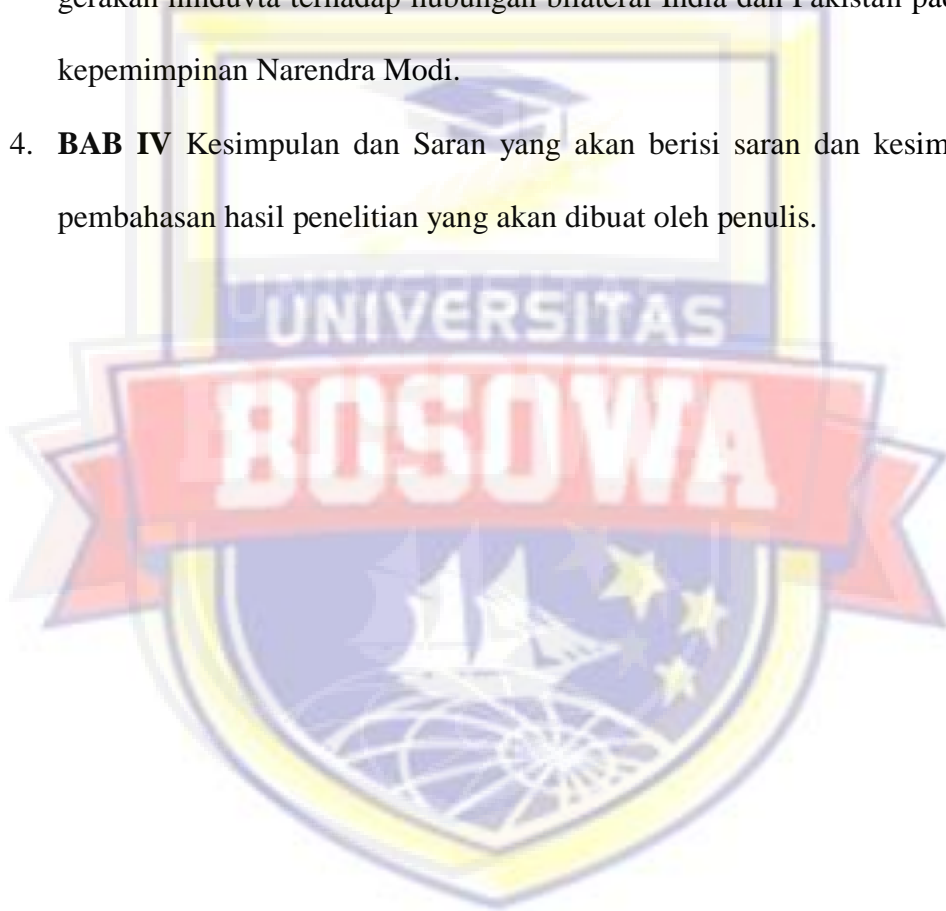
4. Teknik Analisa Data

Analisa Kualitatif, yaitu teknik analisa yang menerapkan data-data non-matematis. Analisa digunakan terhadap sumber-sumber kepustakaan dimana persoalan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada.

G. Rancangan Sistematika Pembahasan (Sistematika Penulisan)

1. **BAB I** Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan (Sistematika Penulisan).

2. **BAB II** Gambaran Umum yang akan berisi penjelasan mengenai sejarah dinamika hubungan bilateral India dan Pakistan, Gerakan Hinduvta, dan dinamika hubungan bilateral India dan Pakistan pada era kepemimpinan Narendra Modi.
3. **BAB III** Analisis dan Pembahasan yang berisi pemaparan terkait pengaruh gerakan hinduvta terhadap hubungan bilateral India dan Pakistan pada era kepemimpinan Narendra Modi.
4. **BAB IV** Kesimpulan dan Saran yang akan berisi saran dan kesimpulan pembahasan hasil penelitian yang akan dibuat oleh penulis.



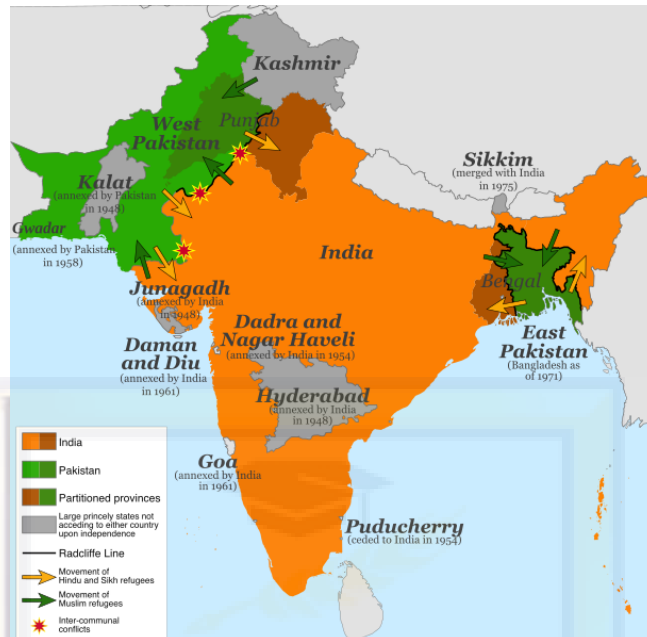
BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Hubungan Bilateral India dan Pakistan

India dan Pakistan merupakan dua negara yang berbagi hubungan linguistik, budaya, geografis, dan ekonomi. Namun hubungan bilateral mereka ditandai dengan permusuhan dan rasa saling tidak percaya karena berbagai peristiwa politik dan sejarah. Hubungan India-Pakistan mengalami kemerosotan sejak pemisahan *British India* pada tahun 1947, Konflik Jammu dan Kashmir, dan sejumlah konflik militer yang terjadi antara dua negara tersebut (EFSAS, 2019).

Pemisahan anak benua India yang mengakhiri kolonialisme Inggris (*British India*) memunculkan India dan Pakistan sebagai negara penerus dari *British India* dengan identitas berbeda. India berdiri sebagai sebuah negara sekuler dengan populasi mayoritas Hindu dan minoritas Muslim yang cukup besar, sementara Pakistan memilih karakter Islam untuk pembangunan bangsa dengan populasi mayoritas Muslim yang sangat besar (EFSAS, 2019 ; Hussain, 2019). Pemisahan ini menimbulkan kerusuhan besar-besaran antara umat Muslim dan Umat Hindu dan menjadi salah satu peristiwa yang meninggalkan warisan kepahitan komunal dengan 1-2 juta kematian dan 15 juta orang terpaksa harus pindah melintasi perbatasan demi keselamatan (Aiyar, 2020).



Gambar 1. Pemisahan *British India* pada Tahun 1947
 Sumber: *commons.wikimedia.org*.

Sayangnya pemisahan *British India* yang melahirkan kebebasan India dan pembentukan Pakistan tidak menghentikan ketegangan antara umat Muslim dan umat Hindu. Pada oktober 1947 setelah pemisahan, India dan Pakistan mulai bersitegang terkait permasalahan Kashmir. Setelah pemisahan, terdapat lebih dari 550 *Princely States* (Wilayah Kerajaan) di seluruh India yang diberikan kebebasan untuk memutuskan bergabung dengan dengan salah satu negara baru atau tetap merdeka (*Blakemore, 2019*). *Princely States* sendiri merupakan wilayah independen dan tidak secara formal dianggap sebagai bagian dari *British India* (*Malji, 2018*).

Sebagian besar *Princely states* menganggap ini sebagai keputusan yang sederhana dimana Negara-negara mayoritas Muslim yang dekat dengan Pakistan memutuskan bergabung dengan Pakistan dan Negara-negara

mayoritas Hindu yang dekat dengan India memilih bergabung dengan India (Malji, 2018).

Maharaja Hari Singh yang saat itu menjadi Pemimpin Hindu di Negara bagian Kashmir yang penduduknya mayoritas Muslim menginginkan kemerdekaan untuk wilayah Kashmir guna menghindari tekanan untuk bergabung dengan salah satu Negara baru. Namun, ditengah-tengah kekerasan terkait partisi di kedua Negara baru, Pemerintah Pakistan menekan Kashmir untuk bergabung dan pemberontak pro Pakistan yang didanai oleh Pakistan telah menduduki sebagian besar wilayah Kashmir sebagai *Princely states* (Blakemore, 2019).

Oleh karena itu, Singh meminta bantuan kepada India untuk menghentikan invasi dengan syarat Singh menandatangani instrument aksesi, dimana Kashmir harus masuk ke India dan menjadi bagian dari Negara baru. Masalah ini kemudian dibawa ke PBB untuk mendapatkan penyelesaian konflik. India dan Pakistan akhirnya menyetujui resolusi 47 dan mengakhiri perang dengan India memperoleh dua pertiga wilayah Kashmir dan Pakistan memperoleh sepertiga dari wilayah Kashmir (Malji, 2018).

Sayangnya, resolusi tersebut nyatanya tidak menyelesaikan ketegangan antara kedua Negara. Hal tersebut justru menjadi awal dari peperangan dan konflik-konflik India-Pakistan selanjutnya. Pada tahun 1965, Agresi kembali terjadi antara India dan Pakistan di perbatasan Kashmir hingga kesepakatan gencatan senjata disetujui. Pada tahun 1971, India dan Pakistan kembali berperang karena aksi separatisme yang terjadi di kawasan timur Pakistan.

Dimana saat itu, India mendukung kaum nasionalis Bengali yang mencoba untuk memerdekakan diri dari Pakistan dan membentuk Negara sendiri menjadi Bangladesh. Angkatan Udara India bahkan meluncurkan serangan bom ke wilayah Pakistan (CNN, 2019).

Melihat hal tersebut, pada tahun 1972, Perdana Menteri India dan Pakistan sepakat untuk mengakhiri konflik dan konfrontasi yang merusak hubungan bilateral kedua negara dan juga mempromosikan hubungan yang harmonis dan ramah serta pembentukan perdamaian yang tahan lama di anak benua dengan menandatangani perjanjian di Kota Simla, India. Kedua Negara juga sepakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dengan jalan damai melalui negosiasi bilateral (EFSAS, 2019).

Namun, pada tahun 1989, Pemberontakan bersenjata kembali pecah di wilayah Kashmir, di tahun ini India meledakkan lima perangkat Nuklir di Pokhran yang ditanggapi oleh Pakistan dengan meledakkan enam perangkat nuklir di Perbukitan Chaghai, Pada tahun 1999, kedua Negara kembali menandatangani kesepakatan besar pertama sejak kesepakatan Simla tahun 1972 yaitu Deklarasi Lahore. Sayangnya, keuntungan diplomatik dari perjanjian tersebut terkikis oleh pecahnya konflik kargil/konflik bersenjata antara India dan Pakistan pada bulan Mei 1999 (Aljazeera, 2019).

Pada tahun 2001, terjadi serangan bersenjata terhadap parlemen India di New Delhi dimana serangan tersebut mengumpulkan massa militer India dan Pakistan di sepanjang LoC dan kebuntuan baru berakhir pada Oktober 2002, setelah mediasi internasional. Pada tahun 2004, Menteri Luar Negeri

kedua Negara bertemu dan memulai proses dialog komposit, dimana pertemuan bilateral diadakan antara pejabat Negara di berbagai tingkatan (EFSAS, 2019).

Pada saat hubungan India dan Pakistan mulai membaik, terjadi Ledakan di dua gerbong Samjhauta Express pada tahun 2007 yang menewaskan 68 orang dan kebanyakan korbannya adalah warga negara Pakistan, pada tahun 2008 aksi terorisme juga terjadi di Mumbai, India (*Center for Arms Control and Non-Proliferation*, 2019). Dan setelah melacak penyerang yang ditangkap dalam aksi terorisme tersebut, seluruh panggilan dan komunikasi terhubung ke Pakistan. Sejak saat itu India kembali memutuskan komunikasi dengan Pakistan. Pada tahun 2009, Pakistan mengakui bahwa serangan tersebut direncanakan di Pakistan. Namun, Pakistan juga menentang bahwa serangan tersebut dibantu oleh Badan Intelijen Pakistan. Menanggapi pernyataan tersebut, India terus mengambil tindakan tegas terhadap Pakistan (EFSAS, 2019). Yang membuat hubungan kedua Negara tersebut terus mengalami ketegangan.

Akhirnya pada tahun 2013, Perdana Menteri India dan Pakistan bertemu di New York saat sidang umum PBB dan sepakat untuk perbaikan situasi di wilayah yang disengketakan (Jammu dan Kashmir) dan memulai awal baru bagi hubungan India dan Pakistan (*The Guardian*, 2013).

Dari banyaknya perselisihan, konflik, dan peperangan antara India dan Pakistan dapat dilihat bahwa kedua Negara telah berupaya untuk menormalkan hubungan mereka melalui negosiasi diplomatik. Diantara

negosiasi tersebut ada negosiasi yang gagal dan juga ada negosiasi yang berhasil. Oleh karena itu, ada beberapa periode dalam hubungan India-Pakistan yang relatif baik dimana kedua Negara berhasil menegosiasikan perjanjian bilateral dari waktu ke waktu, seperti pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Perjanjian Bilateral India-Pakistan dari tahun 1947-2012

NO.	PERJANJIAN	TAHUN
1.	Perjanjian antara India dan Pakistan tentang kerjasama dan bantuan timbal balik dalam masalah kepabeanan.	2012
2.	MoU antara India dan Pakistan tentang kerja sama budaya.	2012
3.	MoU antara India melalui Organisasi Promosi Perdagangan India (<i>India Trade Promotion Organisation</i>) (ITPO) dan Pakistan melalui Otoritas Pengembangan Perdagangan Pakistan (<i>Trade Development Authority of Pakistan</i>) (TDAP).	2011
4.	MoU antara India dan Pakistan tentang pengurangan permintaan narkoba dan pencegahan perdagangan gelap obat-obatan narkotika, psikotropika dan bahan kimia prekursor dan hal-hal terkait.	2011
5.	Kesepakatan antara India dan Pakistan untuk mengurangi risiko kecelakaan yang berkaitan dengan senjata nuklir.	2007
6.	Perjanjian antara India dan Pakistan tentang pra-pemberitahuan uji terbang rudal balistik.	2005
7.	MoU antara India dan Pakistan untuk pembentukan hubungan komunikasi antara penjaga pantai India dan badan keamanan maritim Pakistan.	2005

8.	Deklarasi Lahore	1999
9.	Kode etik untuk perlakuan personel diplomatik/konsuler di India dan Pakistan.	1992
10.	Perjanjian antara India dan Pakistan tentang pencegahan pelanggaran ruang udara dan untuk mengizinkan penerbangan dan pendaratan oleh pesawat militer.	1991
11.	Perjanjian antara India dan Pakistan tentang pemberitahuan sebelumnya tentang latihan militer, manuver, dan pergerakan pasukan.	1991
12.	Perjanjian tentang larangan serangan terhadap instalasi dan fasilitas nuklir antara India dan Pakistan.	1988
13.	Perjanjian kerjasama budaya antara India dan Pakistan.	1988
14.	Persetujuan pembentukan komisi bersama antara India dan Pakistan.	1983
15.	Perjanjian antara India dan Pakistan mengenai pembangkit listrik Salal hydoro.	1978
16.	Perjanjian antara India dan Pakistan mengenai telekomunikasi.	1977
17.	Perjanjian antara India dan Pakistan pada layanan udara.	1976
18.	Perjanjian yang berkaitan dengan komunikasi kereta api antara India dan Pakistan.	1976
19.	Perjanjian terkait perdagangan antara India dan Pakistan.	1975
20.	Perjanjian antara India dan Pakistan yang berkaitan dengan perdagangan.	1975
21.	Protokol antara India dan Pakistan tentang layanan	1975

	pengiriman.	
22.	Protokol antara India dan Pakistan tentang dimulainya kembali perdagangan.	1974
23.	Perjanjian antara India dan Pakistan mengenai visa.	1974
24.	Perjanjian antara India dan Pakistan yang berkaitan dengan pertukaran artikel pos.	1974
25.	Perjanjian antara India dan Pakistan di bidang telekomunikasi.	1974
26.	Protokol yang merupakan Perjanjian antara India dan Pakistan tentang kunjungan ke tempat-tempat suci keagamaan.	1974
27.	Kesepakatan antara India dan Pakistan tentang pembebasan dan pemulangan orang-orang yang ditahan di salah satu negara sebelum konflik tahun 1971.	1974
28.	Perjanjian antara India dan Pakistan tentang hubungan bilateral (Perjanjian Simla).	1972
29.	Perjanjian antara India dan Pakistan tentang penarikan pasukan.	1966
30.	Deklarasi Tashkent ditandatangani antara India dan Pakistan.	1966
31.	Perjanjian terkait perdagangan antara India dan Pakistan.	1963
32.	Perjanjian antara India dan Pakistan tentang pemanfaatan air sistem sungai Indus yang paling lengkap dan memuaskan.	1960
33.	Perjanjian tentang perdagangan antara India dan Pakistan.	1960
34.	Perjanjian pembayaran terbatas antara India dan Pakistan.	1959

35.	Perjanjian antara India dan Pakistan tentang pengaturan transisi <i>ad hoc</i> untuk irigasi yang menggunakan perairan sistem perairan Indus.	1959
36.	Perjanjian yang berkaitan dengan perdagangan antara India dan Pakistan.	1957
37.	Perjanjian antara India dan Pakistan tentang pengaturan transisi <i>ad hoc</i> untuk penggunaan perairan Sistem Sungai Indus.	1955
38.	Perjanjian antar pemerintah antara India dan Pakistan untuk pengaturan transisi <i>ad hoc</i> tahun 1955 tentang penggunaan perairan sungai Indus.	1955
39.	Kesepakatan antara India dan Pakistan tentang masalah keuangan tertentu yang belum terselesaikan.	1955
40.	Kesepakatan antara India dan Pakistan mengenai dimulainya kembali lalu lintas kereta api.	1955
41.	Perjanjian antara India dan Pakistan tentang perdagangan.	1952
42.	Perjanjian perdagangan antara India dan Pakistan.	1951
43.	Perjanjian antara India dan Pakistan tentang keamanan dan hak-hak minoritas (Perjanjian Nehru-Liaquat).	1950
44.	Perjanjian Perdagangan antara India dan Pakistan.	1949
45.	Perjanjian tentang perbankan antara India dan Pakistan.	1949
46.	Perjanjian antara India dan Pakistan terkait dengan layanan udara.	1948
47.	Perjanjian untuk menghindari pajak berganda atas penghasilan antara India dan Pakistan.	1947

Sumber: *High Commission of India*

Data pada tabel di atas memperlihatkan negosiasi perjanjian bilateral

yang berhasil antara India dan Pakistan yang diharapkan dapat meredakan perselisihan antara kedua Negara dan mendorong terciptanya perdamaian di Kawasan Asia Selatan. Namun, Konflik bersenjata, ketidakpercayaan, perbedaan ideologi, dan ketegangan politik terus menyelimuti hubungan India-Pakistan (Hussain, 2019). Dan terus membayangi hubungan bilateral antara kedua Negara tersebut. Apalagi dengan munculnya Nasionalisme Hindu (Hinduvta) di India.

B. Nasionalisme Hindu (Hinduvta) di India

Hinduvta merupakan sebuah istilah yang diciptakan pada tahun 1920-an oleh Vinayak Damodar Savarkar yang secara harfiah berarti ke-Hindu-an (*The Guardian*, 2020). Hinduvta merupakan sebuah ideologi yang dibuat berlandaskan dengan unsur-unsur ajaran agama Hindu dan merupakan turunan dari ajaran Hindu yang dibuat untuk memasukkan ajaran-ajaran Hindu kedalam ranah politik dengan gagasan Nasionalisme Hindu (Khalik, 2021).

Hinduvta merupakan ideologi politik modern yang mengadvokasi supremasi Hindu dan berupaya untuk mengubah India, yang secara konstitusional merupakan negara sekuler menjadi negara etno-religius yang dikenal sebagai *Hindu Rashtra* (Negara Hindu) (SASAC, 2021).

Sejak tahun 1989, Partai Bharatiya Janata yang merupakan sebuah partai politik sayap kanan di India telah mengadopsi Hinduvta sebagai ideologi resminya (Krishnan, 2022). Tidak hanya itu, Hinduvta juga merupakan ideologi dari badan budaya yang dikenal sebagai *Rashtriya Swayamsevak Sangh*, atau *National Volunteer Core* (RSS), yang didirikan

pada tahun 1925 dan memiliki hubungan kuat dengan BJP (Sharma, 2020).

Partai Bharatiya Janata (BJP) merupakan sayap politik dari gerakan nasionalis Hindu yang juga mencakup organisasi akar rumput *Rasthriya Swayamsevak Sangh (RSS)* dan juga *Vishwa Hindu Parishad (VHP)*. Nasionalisme Hindu sebenarnya merupakan ideologi politik yang berasal dari abad ke-19 yang mencakup berbagai kelompok yang memiliki keyakinan bahwa identitas dan budaya nasional India tidak dapat dipisahkan dari agama Hindu. Hinduvta mulai menonjol pada awal abad ke-20 sebagai bagian dari gerakan kemerdekaan di India, yang berusaha memisahkan diri dari identitas pemerintahan kolonial Inggris dan Dinasti Mughal Islam, yang sebelumnya memerintah India dari abad ke-16 (*The Guardian*, 2020). Namun, pengaruh politik Hinduvta mulai terlihat sejak terpilihnya Narendra Modi dari *Partai Bharatiya Janata (BJP)* sebagai Perdana Menteri di India.

Sebelum Modi menjadi PM India pada tahun 2014, dia merupakan Menteri utama negara bagian barat, Gujarat pada tahun 2001-2014 dengan reputasi untuk mengambil posisi garis keras Muslim di wilayah tersebut. Sepanjang karir politiknya, Modi adalah seorang advokat dari Hinduvta (IIS, 2023).

Saat memenangkan pemilu pada tahun 2014, PM Modi berjanji untuk menjadikan abad ke-21 sebagai “Abad India”. Kemenangan Modi dalam pemilihan Perdana Menteri India pada awalnya sangat disambut oleh masyarakat India yang terkesan dengan kebijakan pro-bisnisnya, yang menjanjikan untuk menghidupkan kembali ekonomi India dan juga

mengurangi korupsi yang menjadi wabah di India (Shani, 2021). Bahkan selama kampanye pemilihan nasional India pada tahun 2014, media arus utama India cenderung mengabaikan berbagai tindakan anti-Muslim Modi di India.

Modi bertanggung jawab atas pelanggaran berat kebebasan beragama ketika dia gagal menghentikan kekerasan Anti Muslim di Gujarat pada tahun 2002. Modi memainkan peran dalam menghasut Kerusuhan Gujarat, yang menewaskan lebih dari 2000 orang, dimana korbannya adalah mayoritas Muslim. Kekerasan komunal yang terjadi dimulai ketika Modi menuduh dinas rahasia Pakistan atas kematian 58 peziarah Hindu di atas kereta yang terbakar di stasiun Godhra setelah kembali dari Ayodhya pada 27 februari tahun 2002 (Werleman, 2021). Modi dan petinggi BJP lainnya menganggap bahwa insiden kereta terbakar tersebut merupakan tindakan terorisme yang dilakukan oleh minoritas. Yang pada akhirnya membuat umat Muslim termasuk anak-anak dan perempuan menjadi target penyerangan. Saat itu, tercatat ada 1.044 orang meninggal dunia, 223 orang menghilang dan 2.500 lainnya terluka. Dari seluruh jumlah korban tewas tercatat 790 korban merupakan umat Muslim dan 254 lainnya adalah umat Hindu (CNN, 2022).

Namun, setelah menjabat sebagai Perdana Menteri India terlihat jelas bahwa kebijakan ekonomi neoliberal tidak membuahkan hasil seperti yang dia dan BJP janjikan. Hal tersebut terlihat dari ekonomi India yang tumbuh pada tingkat paling lambat dan juga meningkatnya angka pengangguran dari waktu ke waktu. Untuk mengalihkan perhatian dari kebijakan ekonomi

pemerintahannya yang dianggap gagal, Modi dan para pemimpin BJP beralih pada gagasan dan juga kebijakan yang semakin bermusuhan dengan 200 juta masyarakat muslim di India dengan merangkul mayoritas hindu untuk memegang kekuasaan dalam politik di India (Werleman, 2021). Hal ini, membuat pengaruh ideologi Hinduvta di India semakin lama semakin berkembang.

Hinduvta terus-menerus diasah oleh BJP secara agresif. Lawan-lawan politik BJP mengatakan bahwa retorika ultra-nasionalis partai, berdasarkan nasionalisme Hindu, mengancam untuk menggantikan sekularisme sebagai dasar konstitusi di India. Sejak terpilihnya Modi sebagai Perdana Menteri India, Politisasi agama Hindu yang digalang oleh BJP melalui kebijakan yang lebih agresif membuat agama minoritas di India menjadi warga negara kelas dua (Khrishnan, 2022). Pasanya, politisasi agama Hindu yang digalang oleh BJP di India sangat anti-minoritas. Sejak BJP berkuasa, para menteri dan pemimpin partai di India melakukan dukungan terhadap ras hindu (bangsa hindu). Mereka juga meningkatkan kampanye untuk melarang pernikahan campuran dengan Muslim (Siddiqui, 2017).

Dalam beberapa tahun terakhir, Kekerasan anti-Muslim yang didasarkan oleh ideologi Hinduvta (yang memiliki tujuan untuk menjadikan India sebagi negara Hindu) di India juga mengalami peningkatan yang sangat memprihatinkan. Pengejaran agresif agenda Hindu garis keras oleh BJP yang berkuasa dan juga organisasi persaudaraannya telah memperdalam ketidakamanan agama minoritas yang ada di India (Ramachandran, 2020).

Tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan dan kejahatan rasial terhadap minoritas Muslim sejak pemerintahan Modi dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan.

Dalam tiga tahun pertama pemerintahannya, kebencian dan kekerasan berbasis agama mengalami peningkatan sebanyak 30% di India, yang kemudian meningkat dua kali lipat sejak terpilihnya kembali Modi sebagai Perdana Menteri India di tahun 2019, dengan 90% dari semua kasus kebencian dan kekerasan berbasis agama dalam satu dekade dari 2010 hingga 2020 terjadi sejak Modi berkuasa. Dimana dalam kejahatan rasial tersebut, menjadikan 78% umat Muslim sebagai sasaran dan lebih dari dua pertiga kejahatan rasial anti-Muslim terjadi di negara bagian yang diperintah oleh BJP (Werleman, 2021).

Berdasarkan data yang dirilis oleh *Hate Crime Watch*, dari 287 kejahatan rasial yang dilaporkan dari Januari 2009 hingga 30 April 2019, 262 terjadi dalam lima tahun terakhir. Dari bulan Mei 2014 hingga 30 April 2019, tercatat setidaknya 99 orang tewas dan sekitar 703 luka-luka, dalam berbagai kejahatan rasial yang dimotivasi oleh bias agama di 23 negara bagian dari 36 negara bagian dan wilayah Persatuan di India. Di sekitar 12 negara bagian dan wilayah Persatuan termasuk Assam, Bihar, Delhi, Gujarat, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Manipur, Meghalaya, Chhattisgarh, Tamil Nadu, Telangana, dan Uttarakhand. Berbagai bentuk kejahatan rasial dilaporkan hanya setelah 2014 dimana Narendra Modi mulai menjabat sebagai perdana Menteri India (*National Herald*, 2019)

C. Hubungan Bilateral India Pakistan Era PM Modi

Setelah Modi terpilih sebagai Perdana Menteri India, hubungan bilateral India dan Pakistan masih terus mengalami pasang surut. Melalui kebijakan “*Neighbourhood First Policy*” (kebijakan yang menekankan pemeliharaan hubungan khususnya dengan Negara anggota SAARC [*South Asian Association for Regional Cooperation*] dan juga Negara-negara tetangga yang berada di Kawasan Asia Timur, Myanmar, dan juga Kawasan Asia tenggara bagian Timur) India mengupayakan hubungan bertetangga yang normal dengan Pakistan dan menciptakan lingkungan yang bebas dari teror, permusuhan dan kekerasan.

India berkomitmen untuk mengatasi berbagai masalah yang ada dengan cara bilateral dan damai sesuai dengan Perjanjian Simla dan Deklarasi Lahore. Namun, India beranggapan bahwa Pakistan selalu selalu menanggapi tindakan positif India melalui serangan terorisime (*High Commission of India*, 2019). Hal ini membuat hubungan kedua Negara pada akhirnya terus berada di ambang konflik. India juga seringkali bertindak berbeda dengan yang diupayakan.

Pada tahun 2014, setelah terpilih sebagai Perdana Menteri India, Modi mengundang Nawaz Sharif yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Pakistan untuk menghadiri pelantikannya. Hal tersebut memunculkan sebuah harapan baru akan adanya negosiasi damai antara India dan Pakistan. Namun, optimisme akan adanya perdamaian antara India dan Pakistan berlangsung sangat singkat. Hubungan kedua Negara tersebut

kembali memburuk pada bulan Desember 2014, dimana pada saat itu India membatalkan pembicaraan dengan menteri luar negeri Pakistan setelah komisaris tinggi Pakistan di India bertemu dengan para pemimpin separatis Kashmir (*Center for Preventive Action CFR, 2023*).

Setelah beberapa bulan mengalami hubungan yang dingin, India dan Pakistan kembali memunculkan harapan baru. Pada tahun 2015, hubungan India dan Pakistan mengalami beberapa perkembangan yang positif dan menjadi tonggak sejarah dalam dinamika hubungan kedua Negara. Perkembangan positif ini muncul karena kunjungan mendadak PM Modi ke Lahore untuk bertemu dengan mitranya dari Pakistan, yakni Nawaz Sharif (yang saat itu merupakan PM Pakistan). Kunjungan yang dilakukan oleh Modi tersebut menjadi kunjungan pertama oleh PM India ke Pakistan setelah lebih dari satu dekade (*CNN, 2015*).

Pada tanggal 6 Desember, penasehat keamanan nasional India dan Pakistan bertemu di Bangkok. Pertemuan tersebut diumumkan melalui siaran pers bersamaan setelah pertemuan tersebut selesai. Pada saat itu, kementerian luar negeri India menyampaikan bahwa pertemuan para penasihat membahas hal-hal terkait perdamaian dan keamanan, Jammu dan Kashmir, terorisme, keamanan di sepanjang garis control (*Loc*), dan masalah-masalah lainnya. Beberapa hari kemudian, India dan Pakistan mengumumkan bahwa selama kunjungan Sushma Swaraj (Menteri urusan eksternal India) ke Islamabad, kedua Negara memutuskan untuk terlibat dalam dialog komprehensif yang akan mencakup perdamaian dan keamanan serta Jammu dan Kashmir (*The*

Indian Express, 2015).

Pertemuan yang terjadi antara India dan Pakistan menunjukkan bahwa kedua Negara telah menemukan jalan dalam memecahkan hubungan mereka yang mengalami kebuntuan. Namun, hal tersebut sayangnya tidak bertahan lama. Pada tahun 2016, hubungan India dan Pakistan mengalami kemunduran yang cukup tajam.

Momentum perdamaian yang mulai terbentuk harus berakhir ketika militan bersenjata menyerang pangkalan angkatan darat terpencil di Uri (wilayah yang berdekatan dengan garis kontrol) yang menewaskan 17 tentara India dan menjadi serangan paling mematikan terhadap angkatan bersenjata India setelah lebih dari 3 dekade (CNN, 2016). Ketegangan antara kedua Negara meningkat saat India menuduh Pakistan sebagai dalang dari serangan tersebut. India beranggapan bahwa Jaish-e-Mohammed (kelompok yang diduga terkait dengan badan intelijen utama Pakistan) berada di balik serangan yang terjadi (*Center for Preventive Action CFR*, 2023).

Pada September 2016, Tentara India menyatakan bahwa mereka telah melakukan *Surgical Strikes* atau serangan bedah terhadap tersangka militan di sepanjang perbatasan *de-facto* dengan Pakistan di Kashmir. Pakistan kemudian menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa gagasan serangan bedah oleh militer India adalah sebuah ilusi. Pakistan juga mengatakan bahwa 2 tentaranya tewas dalam sebuah penembakan tanpa alasan di sepanjang garis kontrol (*LoC*) (BBC, 2016).

Pada tahun 2017, Militan kembali melancarkan serangan terhadap

kamp militer India di dekat Srinagar disusul serangan terhadap kamp militer India di Jammu yang kembali menewaskan sejumlah tentara militer pada tahun 2018 (*Center for Preventive Action CFR*, 2023). Ditahun yang sama PM India dan Pakistan berencana untuk membuat perubahan dan perdamaian bagi kedua negara. Namun, Insiden brutal yang memakan korban terus terjadi, seruan tindakan perdamaian India terhadap Pakistan juga ditanggapi dengan penolakan langsung. Oleh karena itu, rencana pertemuan PM India-Pakistan terpaksa dibatalkan (*High Commission of India*, 2019).

Pada tahun 2019, hubungan bilateral India dan Pakistan mendapat pukulan berat dan telah mencapai titik terendahnya karena penghapusan Pasal 370 Konstitusi yang memberikan status khusus kepada Jammu dan Kashmir oleh India. Hingga tahun 2020, tidak terlihat ada perbaikan dari hubungan bilateral India dan Pakistan. Tuduhan India terhadap terorisme lintas batas yang disponsori oleh Pakistan membuat hubungan kedua negara sulit untuk mencapai perdamaian.

Pada tahun 2021, perkembangan hubungan bilateral India hanya dapat dilihat dari pengulangan perjanjian gencatan senjata untuk menciptakan perdamaian di wilayah sengketa Jammu dan Kashmir. Di tahun Ini, Pakistan masih menanggukkan segala hubungan perdagangan dengan India. Pakistan juga menolak usulan dari *Economic Coordination Committee* (ECC) untuk mengimpor gula, kapas, dan benang katun dari India (Diwan, 2021).

Hingga tahun 2022, hubungan bilateral India dan Pakistan masih belum mengalami peningkatan karena tuduhan India yang menyatakan bahwa

India menuduh Pakistan melakukan infiltrasi lintas batas dan mengaktifkan kembali landasan teror di LoC (*The Economic Times*, 2022).

Sejak Modi kembali terpilih sebagai PM India di tahun 2019, hubungan dagang antara India dan Pakistan mengalami kemerosotan yang sangat signifikan, hingga tahun 2022 tidak ada perkembangan yang terlihat dalam hubungan perdagangan kedua negara tersebut.



BAB III

**PENGARUH GERAKAN HINDUVTA TERHADAP HUBUNGAN
BILATERAL INDIA-PAKISTAN ERA PM MODI**

Bab ini akan menganalisis terkait bagaimana pengaruh gerakan Hinduvta terhadap hubungan bilateral antara India dan Pakistan dengan menggunakan konsep hubungan bilateral dan konsep ideologi politik. Dimana konsep ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana hubungan kedua Negara setelah Hinduvta mendominasi politik di India.

Hinduvta merupakan sebuah ideologi politik yang mendukung supremasi Hindu di India yang bertujuan untuk mengubah India sebagai Negara sekuler menjadi Negara etno-Nasionalis (nasionalisme etnik). Seperti yang dijelaskan pada Bab II, Hinduvta merupakan sebuah ideologi yang dibuat dengan dasar ajaran agama Hindu dan juga merupakan turunan dari ajaran Hindu yang dibuat untuk memasukkan ajaran-ajaran Hindu kedalam ranah politik dengan gagasan Nasionalisme Hindu, yang bertujuan untuk mengubah India sepenuhnya menjadi Negara Hindu (*Hindu Rasthra*).

Kebangkitan politik Hinduvta di India dimulai sejak *Partai Bharatiya Janata* (BJP) yang merangkul ideologi Hinduvta mengambil alih pemerintah pusat India pada tahun 2014 (Truschke, 2020). Sebelumnya, perlu diketahui bahwa setelah kemerdekaan India, para aktor Hinduvta telah memainkan peran sentral dalam proses ideologisasi Hinduvta di India melalui berbagai tindak kekerasan untuk menciptakan identitas mayoritas. Namun, keberadaan Hinduvta

tidak benar-benar diurusutamakan sampai dengan pemilihan Perdana Menteri di India pada tahun 2014. Dimana pada saat itu, Modi yang merupakan pemimpin BJP berusaha untuk mengamankan suara dari kelompok mayoritas (Hindu) dan menggunakan posisinya sebagai mantan Ketua Menteri Gujarat sebagai bahan utama dalam memenangkan pemilihan PM India (Leidig, 2020).

Pemerintahan BJP berupaya melakukan ideologisasi di India dengan mendorong berbagai kebijakan dan inisiatif yang dianggap memperkuat identitas Hindu dan prinsip-prinsip Hindutva, seperti:

1. Dengan bantuan BJP, Modi memobilisasi kampanyenya dengan berulang kali mengangkat tema ancaman Muslim terhadap mayoritas Hindu, menciptakan narasi untuk meningkatkan ketidakamanan Hindu di India dan membuat nasionalisme India identik dengan Hindutva sehingga pengarusutamaan Hindutva pasca Narendra Modi terpilih sebagai Perdana Menteri dapat diterima secara luas oleh semua kelas sosial ekonomi masyarakat di India (Leidig, 2020).
2. Mendorong penggunaan bahasa Hindi sebagai bahasa nasional India, yang dianggap sebagai upaya untuk memperkuat identitas Hindu dan Mendorong penggunaan simbol-simbol Hindu dalam kebijakan pemerintah, seperti memperkenalkan kursi toilet dengan gambar dewa-dewi Hindu (Vaishnav, 2019).
3. Mendorong pembangunan Kuil Hindu di Ayodhya, yang dianggap sebagai tempat kelahiran Rama, salah satu dewa Hindu, dan menjadi sumber konflik antara umat Hindu dan Muslim selama beberapa dekade (Vaishnav, 2019).

4. Menerapkan undang-undang yang kontroversial tentang kewarganegaraan yang dianggap diskriminatif terhadap umat Islam.

Sebagai sebuah ideologi, nasionalisme Hindu (Hinduvta) secara dramatis telah mengubah politik India dengan bantuan Narendra Modi (Blank, 2019). Dengan memenangkan pemilu pada tahun 2014, pemerintahan di India mulai didominasi oleh *Partai Bharatiya Janata* (BJP) dan dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Hal pertama yang terlihat dalam pemerintahan Modi ialah upayanya untuk mengubah citra India, baik di dalam maupun di luar negeri, dimana citra positif dalam pembuatan kebijakan luar negeri dijadikan sebagai bahan utama untuk menjadikan India lebih menonjol dalam panggung global. Namun, upaya tersebut nyatanya membuat pola kebijakan dalam negeri dan luar negeri India menjadi lebih kabur (Kinnvall, 2019). Hal ini kemudian dapat dilihat dari bagaimana ideologi Hinduvta (ke-Hindu-an) mempengaruhi perkembangan politik di India.

Proses ideologisasi Hinduvta telah memicu polarisasi sosial dan politik di India. Terjadi berbagai kontroversi terkait hak-hak minoritas, kebebasan beragama, dan juga penafsiran terhadap ideologi Hinduvta. Serangkaian perkembangan politik dan kebijakan India yang dipengaruhi oleh nasionalisme Hindu dan menekankan superioritas Hindu juga telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap hubungan bilateral India dan Pakistan dalam berbagai cara. Adapun pengaruh gerakan hinduvta terhadap hubungan bilateral India dan Pakistan adalah sebagai berikut:

A. Meningkatnya Sentimen Anti-Pakistan

Identitas nasional India yang tengah didominasi oleh Hinduva telah membentuk cara India berinteraksi dengan negara-negara lain. Khususnya Negara tetangga, yakni Pakistan. Kebijakan-kebijakan BJP dan Modi yang mencerminkan dan mendukung mayoritas Hindu di tingkat Pemerintah telah menciptakan ketegangan yang nyata antara umat Muslim-Hindu dan juga India-Pakistan.

Pemerintahan Modi dan BJP yang mencoba untuk mengubah India menjadi Negara Hindu dan menghilangkan prinsip-prinsip sekuler India sangat bertentangan dengan identitas nasional Pakistan. Sebelumnya perlu diketahui bahwa Pakistan merupakan sebuah Negara yang didirikan atas nama Islam dan menjadi salah satu negara tetangga India dengan penduduk mayoritas Muslim.

Sejak pemisahan British India pada tahun 1947, Pakistan digagas sebagai rumah bagi Muslim Asia Selatan. Ditahun yang sama, Pakistan juga bergeser dari Negara dengan budaya Muslim menjadi Negara Islam religius yang memeluk sikap “Anti-Indianism” sebagai titik temu nasional (Danziger, 2020). Sedangkan di India, sentimen Anti-Pakistan juga telah menyertai gagasan dan kekerasan anti-Muslim yang meluas. Masyarakat yang memiliki sentimen Anti-pakistan kuat pada akhirnya menolak berbagai upaya kerjasama dan dialog antara India dan Pakistan, dan juga tidak menutup kemungkinan mereka akan menyerukan pendekatan yang lebih keras terhadap Pakistan.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa sentimen anti-Pakistan mengacu pada perasaan negatif, ketidaksetujuan, dan bahkan kebencian terhadap Pakistan

ataupun hal-hal yang berkaitan dengan Pakistan. Sentimen anti-Pakistan muncul karena beberapa hal seperti sejarah, budaya, sosial, dan juga politik. Sentimen anti-Pakistan yang berkembang di India dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sejarah konflik antara India dan Pakistan, kekerasan lintas batas, dan juga terorisme. Perkembangan sentimen anti-pakistan di India kemudian diperparah dengan munculnya Hinduvta sebagai Ideologi Politik India dibawah pemerintahan Modi dan BJP.

Insiden terorisme dan kekerasan lintas batas yang terjadi di India seringkali dikaitkan dengan kelompok militan yang berbasis di Pakistan, sehingga India dibawah Modi dan BJP mengambil kesempatan untuk meningkatkan sentimen anti-Pakistan dengan terus melayangkan tuduhan terhadap Pakistan dan memupuk banyak kebencian masyarakat India terhadap Pakistan. Hal ini kemudian terus meningkatkan ketegangan yang lebih serius antara Hindu-Muslim dan juga India-Pakistan. Sentimen anti-Pakistan yang meningkat di India dapat diamati dalam berbagai bentuk, seperti:

1. Meningkatnya aksi protes dan demonstrasi sentimen anti-Pakistan

Aksi protes dan demonstrasi di India yang mengungkapkan sentimen anti-Pakistan sering terjadi dalam beberapa situasi, seperti organisasi ekstremis Hindu yang melakukan aksi protes dan menyebabkan pembatalan pertemuan ketua dewan kriket Pakistan (PCB) dengan rekannya di Mumbai (Dawn, 2015). Kelompok sayap kanan Shiv Sena juga melakukan aksi protes terhadap mantan menteri luar negeri Khurshid Mahmud Kasuri yang ingin melakukan peluncuran buku di India dengan meneriakkan slogan-slogan dan

meminta membatalkan acara dan juga mengolesinya dengan cat hitam. Hal ini juga membatalkan konser oleh penyanyi populer Pakistan di Mumbai dan Pune (Dawn, 2015).

ACLEED mencatat lebih dari 90 protes anti-Pakistan telah terjadi di India, terutama sejak serangan URI yang terjadi pada tahun 2016. Serangan tersebut diyakini telah dilakukan oleh kelompok militan dari Pakistan. Aksi protes tersebut menimbulkan kecaman dan juga tuntutan yang tegas terhadap pemerintah India. Mereka meminta untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap dugaan terorisme yang disponsori oleh Pakistan (ACLEED, 2017).

Protes dan aksi demonstrasi yang terjadi ada yang berlangsung damai dan juga agresif. Masyarakat India, khususnya ekstremisme Hindu seringkali melakukan aksi protes bahkan kekerasan untuk menghalangi acara-acara di India yang melibatkan warga Pakistan.

2. Pemanfaatan media sosial sebagai alat penyebaran sentimen anti-Pakistan

Media sosial di India memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik. Beberapa liputan media sosial di India berkontribusi dalam peningkatan sentiment anti-Pakistan di India dengan menyoroti insiden negatif dan menekankan ancaman yang dirasakan karena Pakistan.

India menggunakan jaringan media sosial palsu untuk mencemarkan nama baik Pakistan. Sebuah organisasi bernama DisinfoLab yang berbasis di Brussels mengungkapkan bahwa terdapat 265 outlet media palsu yang

tersebar di 65 negara. Outlet media tersebut bertugas untuk melayani India dan memiliki fokus utama untuk menanamkan dan memperkuat sentimen anti Pakistan pada orang India (Mastor, 2021). Hal tersebut dapat terlihat dari ramainya masyarakat yang menyerukan sentimen anti-Pakistan melalui platform media sosial dengan berbagi postingan, tagar, dan komentar yang mengkritik dan mengutuk Pakistan.

3. Penggunaan sentimen anti-Pakistan dalam gagasan politik India

Para pemimpin dan partai politik India seringkali menggunakan sentimen anti-Pakistan untuk mendapatkan dukungan politik dan juga pengalihan isu-isu internal yang muncul di India. Sejak pemerintahan Modi, sentimen anti-Pakistan terus muncul di India, dalam berbagai kesempatan anggota-anggota dari partai BJP seringkali menyuarakan sentiment anti-Pakistan secara terbuka. Hal ini terlihat dari seruan ketua partai BJP Gujarat yang secara terbuka meminta orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan India untuk pergi ke Pakistan. Tidak hanya itu, BJP Yuva Morcha (sayap pemuda BJP) bahkan mendesak mantan menteri luar negeri dan anggota Lok Sabha, Shashi Tharoor, untuk pergi ke Pakistan karena mengkritik pemerintahan Modi (*The Diplomat*, 2019).

Faksi pro-BJP dan ketua menteri menuduh warga Negara India dan juga intelektual publik yang menentang segala program pemerintah sebagai sikap Anti-India dan menyerukan masyarakat Muslim India untuk pergi ke Pakistan. Pembangkang Muslim dan masyarakat yang "anti-nasional", dituduh sebagai "pro-Pakistan." Wartawan yang kritis terhadap BJP

menghadapi pelecehan online yang meluas dari pendukung BJP. Wartawan Rana Ayyub, yang menerbitkan "File Gujarat" menilai masa jabatan Modi dan Shah di pucuk pimpinan negara, disuruh "kembali ke Pakistan." Sarjana Gandhi terkemuka Ramachandra Guha ditahan saat berbicara dengan NDTV tentang konstitusi India dan memegang poster Gandhi. Penulis Aatish Taseer kehilangan status Kewarganegaraan Luar Negeri India setelah menerbitkan konten anti-Modi, setelah itu para pendukung Modi mengecamnya sebagai mata-mata Pakistan (Danziger, 2020). Mereka juga menarik dukungan dan pengikut mereka menggunakan sentimen anti-Pakistan. Pasalnya, sentimen anti-Pakistan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat luas untuk membuat pernyataan keras terhadap Pakistan dan menuduh Pakistan atas berbagai insiden dan konflik yang terjadi di India.

Melihat perkembangan sentimen anti-Pakistan yang terus berkembang di India, membuat Pakistan angkat suara. Melalui siaran pers yang dikeluarkan oleh *Ministry of Foreign Affairs Government of Pakistan*, Islamabad pada tahun 2020, pemerintah Pakistan menyatakan menolak dengan tegas gagasan anti-Pakistan yang terus menerus berkembang di India dibawah kepemimpinan Modi dan BJP. Pakistan beranggapan bahwa tindakan India untuk meningkatkan sentimen anti-Pakistan dilakukan untuk mengalihkan perhatian dari kritik internasional atas tindakan ilegal yang terjadi di Jammu dan Kashmir serta meningkatnya protes terhadap kebijakan anti-Minoritas di India. Pakistan juga beranggapan bahwa tuduhan yang dilayangkan oleh India hanyalah tuduhan yang didasarkan oleh rekayasa belaka yang digunakan oleh India sebagai alat propaganda (*Ministry of*

Foreign Affairs Government of Pakistan, 2020).

Pakistan melihat bahwa peningkatan intoleransi ideologi ekstrimis Hinduvta yang terus merasuki institusi India, tidak hanya akan mengancam minoritas India tetapi juga dapat membahayakan perdamaian dan juga stabilitas regional. Oleh karena itu, Pakistan berharap akan ada tindakan yang diambil untuk meminta pertanggungjawaban India atas tindakan ilegal dan membuat India dapat menghormati kewajibannya internasionalnya (*Ministry of Foreign Affairs Government of Pakistan, 2020*).

Melihat respon Pakistan terhadap pemerintahan India yang diiringi oleh hinduvta, sebenarnya menggambarkan bagaimana hubungan kedua Negara yang sangat bertentangan. Perbedaan ideologi membuat kedua Negara membangun sebuah gagasan yang pada akhirnya membuat kedua Negara tersebut juga tidak dapat lepas dari hubungan yang konfliktual.

Berbagai bentuk sentimen Anti-Pakistan yang terus berkembang memiliki kaitan yang sangat erat dengan hubungan bilateral dan dapat memicu meningkatnya ketegangan antara India dan Pakistan. Hal ini dapat mengarah pada kejadian-kejadian di dalam militer atau konflik bersenjata yang memperburuk situasi dan menghambat upaya-upaya diplomasi dan dialog antara kedua negara. Peralnya, sulit untuk mencapai kesepakatan atau membangun kepercayaan jika opini publik dan pemimpin politik di kedua negara memiliki pandangan negatif terhadap pihak lain.

Sentimen Anti-Pakistan juga dapat mempengaruhi hubungan ekonomi antara kedua negara. Perdagangan dan investasi antara India dan Pakistan dapat

dipengaruhi oleh ketegangan politik dan sentimen anti-Pakistan. Oleh karena itu, sangat sulit bagi India dan Pakistan untuk sampai pada titik perdamaian.

B. Munculnya Kebijakan Diskriminatif

Gerakan Hindutva telah memainkan peran dalam membentuk beberapa kebijakan yang dianggap implisit terhadap agama minoritas, terutama Muslim, di India. Hindutva adalah ideologi nasionalis Hindu yang mengutamakan identitas Hindu dan pandangan Hindu yang nasionalistik. Dalam konteks politik India, gerakan Hindutva memiliki pengaruh di dalam maupun di luar pemerintahan India karena gerakan Hindutva telah dijadikan sebagai sebuah ideologi politik yang dianut oleh Modi dan BJP dalam sistem politik pemerintahan India dengan tujuan untuk mengubah India menjadi negara Hindu.

Saat ini, tercatat sekitar dua ratus juta masyarakat Muslim tinggal di India dan membentuk sebuah kelompok minoritas terbesar di Negara dengan mayoritas Hindu. Selama beberapa dekade masyarakat Muslim di India banyak mendapat diskriminasi dalam pekerjaan dan pendidikan mereka, serta menghadapi hambatan dalam mencapai kekayaan dan kekuasaan politik dan secara tidak proporsional menjadi korban kekerasan komunal. Perdana Menteri Modi dan Partai BJP yang berkuasa di India juga telah bergerak untuk membatasi hak-hak umat Muslim melalui berbagai undang-undang yang cenderung bersifat anti-Muslim (Maizland, 2022).

Sejak berkuasa di tingkat nasional pada Mei 2014, anggota partai BJP terlihat sangat sering menggunakan gagasan komunal yang banyak menimbulkan tindakan main hakim sendiri terhadap konsumsi daging sapi dan hal-hal yang

berkaitan. Diantara bulan Mei tahun 2015 sampai dengan Desember tahun 2018 tercatat setidaknya 44 orang, yang 36 orang di antaranya adalah muslim, meninggal dunia di 12 negara bagian India. Selama periode yang sama, tercatat sekitar 280 orang terluka dalam lebih 100 insiden berbeda di 20 negara bagian India. Dimana serangan-serangan dalam insiden tersebut dipimpin oleh kelompok perlindungan sapi yang banyak diantaranya mengaku berafiliasi dengan kelompok Hindu militan yang juga memiliki hubungan dengan partai BJP (*Human Right Watch*, 2019).

Modi dan BJP mengkriminalisasi kepemilikan daging sapi dengan berbagai undang-undang terkait penyembelihan dan kepemilikan sapi yang dikeluarkan di beberapa Negara bagian di India sejak mereka berkuasa, yang dapat dilihat pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Undang-Undang Terkait Penyembelihan dan Kepemilikan daging sapi.

Undang-Undang	Tahun
Undang-Undang Pelestarian Hewan Maharashtra (Amandemen). Undang-undang ini melarang penyembelihan sapi jantan, lembu jantan dan anak sapi dan siapa pun yang ditemukan memiliki daging sapi akan dipenjara hingga lima tahun.	2015
Undang-Undang Haryana Gauvansh Sanrakshan dan Gausamvardhan. Dalam UU ini, penjualan sapi untuk disembelih ke negara bagian lain akan diancam dengan hukuman tujuh tahun penjara, penyembelihan sapi akan terancam 10 tahun penjara dan Kepemilikan daging sapi dapat dihukum hingga lima tahun penjara.	2015

<p>RUU Pelestarian Hewan Gujarat (Amandemen). UU ini memperpanjang hukuman penyembelihan sapi yang awalnya tujuh tahun penjara menjadi seumur hidup. UU ini juga memungkinkan penyitaan permanen kendaraan yang mengangkut hewan kecuali dalam kondisi tertentu. Denda yang awalnya Rs 1 lakh juga dinaikkan menjadi Rs 5 lakh dal UU ini.</p>	2017
<p>Peraturan Pencegahan Penyembelihan dan Pemeliharaan Sapi Karnatak dan pencabutan undang-undang tahun 1964 yang mengizinkan penyembelihan sapi jantan. Aturan ini akan membuat penyembelihan sapi dihukum hingga tujuh tahun. Pembelian, penjualan, pembuangan atau pengangkutan ternak di luar negara kecuali dengan syarat tertentu akan dihukum lima tahun penjara dan denda hingga Rs 10 lakh.</p>	2020

Sumber: *The Wire*, 2021

UU terkait penyembelihan daging sapi yang berlaku di beberapa negara bagian di India menimbulkan aksi protes oleh masyarakat Muslim yang ada di Kashmir, kelompok-kelompok minoritas dan para aktivis melayangkan protes mereka dengan mengatakan bahwa larangan daging sapi tidak sesuai dengan asas sekuler dan juga bertentangan dengan prinsip kebebasan individu di India (BBC, 2015).

Selain penerapan UU terkait penyembelihan daging sapi, BJP dan Modi juga menuduh para pemuda dan pria Muslim ingin mengubah demografi India dengan merayu dan menikahi perempuan hindu untuk melakukan pindah agama melalui jalan cinta dengan momok Jihad Cinta atau yang lebih dikenal dengan “*Love Jihad*”. Momok Jihad Cinta juga terus dikembangkan oleh para pendukung

Ideologi Hinduvta.

Setiap tahun ada banyak pasangan beda agama yang ingin melaukan pernikahan beda agama dan mengadu ke kelompok sipil penyokong keberagaman yang bernama Dhanak. Dari semua pasangan yang datang tercatat setidaknya 52% perempuan Hindu yang berencana menikah dengan pria Muslim (BBC, 2020). Melihat hal tersebut, BJP dan Modi mengusung undang-undang baru yang menentang perpindahan agama yang menargetkan jihad cinta. Setelah itu, beberapa Negara bagian India juga mulai mengusung undang-undang yang sama. Undang-undang tersebut dapat dilihat pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Undang-Undang Kebebasan Beragama di India Era Narendra Modi

Undang-Undang	Tahun
Undang-Undang Kebebasan Beragama Uttarakhand. UU ini merupakan UU yang pertama kali disahkan oleh pemerintahan BJP setelah teori konspirasi (Love Jihad) mulai beredar. UU ini merupakan aturan yang melarang atau membatasi perpindahan keyakinan. Namun, UU ini mengatakan bahwa 'jika seseorang kembali ke agama leluhurnya' maka ini tidak akan dianggap sebagai konversi. Artinya, pindah agama ke Hindu tidak dihitung sebagai pindah agama.	2018
Undang-Undang Kebebasan Beragama Himachal Pradesh. Undang-undang mensyaratkan pemberitahuan 30 hari untuk individu yang ingin melakukan pindah Agama dengan syarat-syarat tertentu dan Jika Negara menentukan bahwa syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka konversi itu dinyatakan tidak sah dan batal.	2019
Uttar Pradesh Vidhi Viruddh Dharma Samparivartan	2020

<p>Pratisedh Adhyadesh (Larangan Konversi Agama Secara Haram). UU ini melarang konversi kecuali dengan izin pemerintah dan pemberitahuan 60 hari sebelumnya dan konversi untuk pernikahan adalah ilegal.</p>	
<p>Madhya Pradesh Dharma Swatantreya Adhyadesh (Ordonansi Kebebasan Beragama). UU ini menggantikan Undang-Undang Kebebasan Beragama tahun 1968, dimana Konversi hanya dapat terjadi dengan izin pemerintah dan pemberitahuan 60 hari sebelumnya, UU ini akan menghukum konversi melalui pernikahan selama 10 tahun penjara dan membatalkan pernikahan semacam itu dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan ini dapat menuntut hak atas harta milik ayah mereka.</p>	2020

Sumber: *The Wire*, 2021

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan di pemerintahan Narendra Modi sangat jelas mencerminkan sikap bias terhadap umat Muslim di India. Pada tahun 2018, India mendeportasi sejumlah masyarakat Muslim Rohingya ke Myanmar walaupun nyawa dan keamanan mereka dapat terancam (*Human Right Watch*, 2020). Setelah memenangkan kembali masa jabatannya pada tahun 2019, Modi mengesahkan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan yang memberikan kewarganegaraan kepada minoritas agama dari Negara tetangga (Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan).

Pengesahan UU ini meimbulkan aksi protes besar-besaran di berbagai negara bagian India, aksi protes ini berlangsung selama berhari-hari dan membuat pemerintah India kesulitan untuk menghentikannya. Aksi protes ini meledak disebabkan oleh UU Amandemen Kewarganegaraa yang cenderung bersifat anti-Muslim karena UU tersebut memberikan perlindungan kepada agama lain namun

tidak dengan penganut Islam (CNBC, 2019).

Para kritikus juga mengatakan bahwa RUU ini cenderung bersifat diskriminatif terhadap umat Muslim karena mengecualikan Muslim dan untuk pertama kalinya UU menerapkan kriteria agama dalam masalah kewarganegaraan. Pemerintah Modi kemudian berpendapat bahwa undang-undang tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan bagi minoritas agama yang rentan yang menghadapi penganiayaan di tiga negara mayoritas Muslim tersebut (Maizland, 2022). Namun, hal tersebut telah melanggar prinsip-prinsip sekuler yang diterapkan dalam konstitusi di India.

Banyaknya tindakan dan kebijakan yang cenderung bersifat anti-Muslim sejak Modi dan Partai BJP berkuasa telah memperlihatkan bagaimana Hinduvta sebagai sebuah ideologi yang digunakan dalam sistem politik India membawa dampak yang signifikan dalam dinamika politik India. Dengan ideologi Hinduvta, Modi mengintegrasikan pemikiran fanatik Hindu ke dalam budaya sosial-politik India. Modi dan BJP berupaya untuk memperluas gagasan Hinduvta dan mengikis populasi Muslim di India.

Gerakan hinduvta Modi yang telah memperluas identitas hindu ini membuat ketegangan India dan Pakistan sebagai negara mayoritas muslim semakin meningkat. Identitas Hindu yang semakin meluas telah mempengaruhi bagaimana persepsi masyarakat maupun pemimpin India dan Pakistan, serta mempengaruhi dinamika hubungan bilateral kedua negara tersebut. Pasalnya, Pakistan seringkali menggunakan isu-isu yang berkaitan dengan Muslim di India sebagai dasar untuk mengkritik India dalam hubungan bilateral kedua negara.

Hinduvta telah membangun permusuhan dan persaingan antara Pakistan dan India. Jadi, apabila Ideologi Hinduvta terus memainkan perannya dalam pemerintahan Modi, konflik campuran akan terus menghiasi hubungan India dan Pakistan di masa depan. Apalagi, Nasionalisme Hindu-Muslim yang dimiliki oleh kedua Negara tersebut telah memperkuat dilemma keamanan dan juga defisit kepercayaan yang sudah ada sejak lama. Nasionalisme Hindu-Muslim juga semakin mendikte kebijakan dan tindakan kedua Negara tersebut. Dan pada akhirnya, serangan nuklir, disonansi persepsi, serangan konvensional intensitas rendah dan isolasi diplomatik antara India-dan Pakistan akan terus mengalami peningkatan (Leeza, 2020).

C. Meningkatnya Ketegangan di Wilayah Sengketa Jammu & Kashmir

Sejak PM Modi berkuasa pada tahun 2014, situasi di wilayah sengketa, khususnya Kashmir mengalami banyak perubahan yang mengakibatkan peningkatan ketegangan di wilayah tersebut. Sebelumnya perlu diketahui bahwa gerakan Hinduvta mendukung klaim atas wilayah Kashmir sebagai bagian integral negaranya. Oleh karena itu India berupaya untuk sepenuhnya menguasai wilayah Kashmir dengan mengintegrasikan Kashmir kedalam pemerintahan Hindu melalui gerakan Hinduvta. Tindakan Modi dan BJP untuk mempromosikan ideologi Hinduvta telah membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat di wilayah Kashmir. Hal ini dapat terlihat dari berbagai kerusuhan, krisis kemanusiaan, dan ketegangan agama yang meluap di wilayah sengketa tersebut. Meningkatnya ketegangan di wilayah Jammu dan Kashmir yang disebabkan oleh kontribusi hinduvta sebagai ideologi politik yang saat ini

tengah mendominasi sistem politik India dapat dilihat dari:

1. Pencabutan otonomi Kashmir

Pada tahun 2019, ketika Modi kembali terpilih sebagai perdana menteri, India membuat gebrakan baru Kashmir dengan mencabut secara sepihak otonomi konstitusional satu-satunya negara bagian dengan mayoritas Muslim di India selain pulau kecil Lakshadweep, yaitu Jammu dan Kashmir yang diberikan pada tahun 1950-an (*Human Right Watch*, 2020). India mengatakan pencabutan pasal 370 ini dilakukannya untuk menghapus berbagai pemberontakan bersenjata di wilayah tersebut guna mengantarkan perdamaian (*Al-Jazeera*, 2022). Sayangnya alasan India untuk mencabut otonomi konstitusional berbanding terbalik realitas yang ada.

Pencabutan pasal 370 dari konstitusi India secara tidak langsung telah membatalkan hak-hak khusus yang dimiliki oleh wilayah sengketa tersebut, baik dalam hal undang-undang maupun kebijakan dalam berbagai bidang. Hal ini tentu saja menimbulkan kemarahan dan aksi protes dari masyarakat di wilayah tersebut. Hubungan India dan Pakistan juga mengalami ketegangan yang cukup serius. Selain mencabut Pasal 370, pemerintah Modi juga mengambil kebijakan kontroversial lainnya dengan membagi Jammu dan Kashmir menjadi dua wilayah persatuan teritorial yang lebih kecil, Jammu dan Kashmir dan Ladakh. Ketegangan pada wilayah sengketa akhirnya semakin memuncak.

Melihat hal tersebut, Modi mencoba untuk mebatasi kebebasan dan komunikasi di wilayah sengketa. pemerintah India mengambil langkah dengan memutus komunikasi, internet, dan pergerakan di wilayah Kashmir. Langkah ini

tentu saja mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk dan memicu protes serta ketegangan lebih lanjut (*Human Right Watch*, 2019).

Pada akhirnya pembunuhan terhadap pemberontak hampir setiap hari terjadi di wilayah sengketa, aksi tembak-menembak dan juga serangan yang direncanakan antara masyarakat sipil dan pejabat keamanan India terus berlangsung. Sejak pencabutan pasal 370 hingga tahun 2022 tercatat setidaknya 197 personel keamanan, 675 tersangka pemberontak, dan 131 warga sipil tewas dalam gelombang kekerasan yang terus melanda wilayah tersebut (*Al-Jazeera*, 2022).

Melihat hal tersebut, Pakistan mendesak komunitas internasional untuk menyadari berbagai bentuk penganiayaan terhadap minoritas di India, khususnya Muslim, dan krisis kemanusiaan yang terus berlanjut di wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki India. Pakistan berharap akan ada tindakan yang diambil untuk meminta pertanggungjawaban India atas tindakan ilegal dan membuat India dapat menghormati kewajiban internasionalnya (*Ministry of Foreign Affairs Government of Pakistan*, 2020).

Tahun 2019, dapat dikatakan sebagai tahun terburuk dalam dinamika hubungan bilateral India dan Pakistan. Dimulai pada februari 2019 ketika India mengumumkan untuk mencabut *Most Favoured Nation Status* untuk Pakistan dan meningkatkan bea masuk dari Pakistan sebesar 200%, karena serangan terhadap pasukan militer India di wilayah Kasmir yang menewasakn 44 tentara India (*Dawn*, 2019). Disusul dengan penghapusan Pasal 370 Konstititusi yang memberikan status khusus kepada Jammu dan Kashmir oleh India, yang membuat

Pakistan menurunkan hubungan diplomatik dengan India dengan mengumumkan rencana pengusiran duta besar India dan menanggukkan segala bentuk aktivitas perdagangan dengan India (BBC, 2019). Bahkan hingga saat ini masih belum terlihat perbaikan dalam hubungan bilateral kedua negara.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Gerakan Hindutva adalah gerakan nasionalis Hindu yang berfokus pada promosi identitas Hindu dan pengutamaan nilai-nilai Hindu dalam masyarakat India. Terpilihnya Modi sebagai Perdana Menteri India telah membawa warna baru bagi sistem politik India. Sejak tahun 1989, *Partai Bharatiya Janata* (BJP) telah berfokus pada agama Hindu dan ideologi nasionalis hindu (Hinduvta) dan Narendra Modi, Perdana Menteri India, telah menjadi tokoh kunci dalam politik Hinduvta. Oleh karena itu, terpilihnya Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India membuat Hinduvta mendominasi sistem politik di India.

Gerakan politik Hinduvta di India dipengaruhi oleh *Partai Bharatiya Janata* (BJP) dan ideologi Hindu. Sejak 2014, Hinduvta aktif bekerja untuk membangun identitas nasional dan sejajar dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi. Gerakan ini juga mempengaruhi perkembangan hubungan India dengan negara lain, khususnya Pakistan. India dan Pakistan memiliki ideologi yang sangat bertentangan. Perbedaan ideologi tersebut membuat India dan Pakistan tidak dapat lepas dari hubungan yang konfliktual. Serangan, perang, dan kerusuhan terus mewarnai hubungan kedua Negara. Apalagi dengan latar belakang sejarah dan politik yang membuat kedua negara sulit untuk mencapai titik perdamaian.

Munculnya gerakan Hinduvta sebagai sebuah ideologi politik di India

telah membawa ketegangan yang lebih serius terhadap hubungan kedua negara karena pengaruh hindutva yang telah mendominasi sistem politik India dan juga mengatur bagaimana India berinteraksi dengan Pakistan. Adapaun pengaruh gerakan hindutva sebagai sebuah ideologi politik India terhadap hubungan bilateral India dan Pakistan dapat dilihat dari:

1. **Meningkatnya Sentimen Anti-Pakistan:** Meningkatnya sentimen anti-Pakistan yang disebabkan oleh gerakan Hindutva dapat terlihat dari berbagai aksi protes dan juga kebencian masyarakat India terhadap semua hal yang bersangkutan dengan Pakistan. Sentimen anti-Pakistan yang terus berkembang kemudian membawa dampak yang signifikan pada hubungan antara India dan Pakistan. Gerakan Hindutva yang mendorong nasionalisme Hindu dan membenamkan identitas Hindu akan mempengaruhi persepsi masyarakat India terhadap Pakistan dan juga mempengaruhi dinamika politik dan diplomasi antara kedua negara.
2. **Munculnya Kebijakan Diskriminatif:** Sejak terpilih sebagai Perdana Menteri India, Narendra Modi telah membuat berbagai kebijakan yang dianggap diskriminatif terhadap kelompok tertentu, terutama terhadap minoritas agama, terutama Muslim. Hal ini kemudian mempengaruhi persepsi masyarakat maupun pemimpin India dan Pakistan dalam merespon hal-hal yang berkaitan dengan kedua negara tersebut.
3. **Meningkatnya ketegangan di Wilayah Kashmir:** Sejak pemerintahan Modi, kerusuhan di wilayah Kashmir terlihat mengalami peningkatan, apalagi dengan dicabutnya status otonomi Kashmir. Meningkatnya ketegangan di

wilayah Kashmir dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap situasi keamanan regional dan hubungan bilateral India-Pakistan.

B. Saran

Pengaruh gerakan Hindutva sebagai sebuah ideologi politik India terhadap hubungan bilateral India dan Pakistan adalah sebuah fenomena yang kompleks. Apalagi dengan perbedaan ideologi dan juga latar belakang hubungan kedua negara yang selalu diwarnai dengan konflik. Untuk itu, saran dari penulis ialah diperlukan adanya diplomasi dan dialog antara India dan Pakistan. Kedua negara perlu memprioritaskan diplomasi dan dialog sebagai cara untuk meredakan ketegangan dan memperbaiki hubungan kedua negara. Pembicaraan yang konstruktif juga dapat membantu mengatasi perbedaan yang dimiliki oleh kedua negara dan mengurangi sentimen anti-Pakistan yang terus berkembang di India.

Dan penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan karena berbagai keterbatasan, khususnya dalam pengumpulan data. Oleh karena itu, semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adams, I., *Political Ideology Today*, Manchester:Manchester University Press, 2001,
<https://books.google.co.id/books?id=apstK1qIvvMC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Budiardjo, Miriam., *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2003,
https://books.google.co.id/books?id=_dZ247rCydIC&dq=macam-macam+ideologi+politik&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s.
- Freeden, M., *Ideology: Political Aspects*, in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 2001,
<https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/political-ideology>.
- Jurdy, Syaifruddin., *Kekuatan-kekuatan Politik Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2016,
https://books.google.co.id/books/about/Kekuatan_Kekuatan_Politik_Indonesia.html?id=XqjhnQAACAAJ&redir_esc=y.
- Pannier, Alice., "Bilateral Relation", in T. Balzacq et al. (eds)., *Global Diplomacy, An Introduction to Theory and Practice*, Paris, France., 2020, hal 19-32,
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-28786-3&ved=2ahUKEwiByPy0x_b-AhWP7TgGHX-eBXcQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw3p4OA2TI2hJASWMXIP7osY.
- Perwita, A. A. B & Yani, Y. M., *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung:PT Remaja Rosdakarta, 2005,
<https://id.scribd.com/document/457133153/PENGANTAR-ILMU-HUBUNGAN-INTERNASIONAL-Dr-Anak-Agung-Banyu-Perwita-Dr-Yanyan-Mochamad-Yani-pdf>.

Jurnal:

- Aiyar, S. S. A., 2020. Despite Modi, India Has Not Yet Become a Hindu Authoritarian state. *Policy Analysis*. No 903. Cato Institute.
<https://www.cato.org/policy-analysis/despite-modi-india-has-not-yet-become-hindu-authoritarian-state#historical-background>. Diakses pada 25 Juni 2022.
- Asy'Ary, N. W. N. 2022. Pengaruh Hindutva Dalam Kebijakan Pemerintahan India Terkait Masalah Imigran Muslim (Studi Kasus Amandemen Uu Kewarganegaraan Tahun 2019).
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/39831>. Diakses pada tanggal 14 November 2022.

- Azam, A. 2022. Indian Foreign Policy towards Pakistan during Modi Era: Assessing the Role of Hindu Nationalism. *TTN Journal*. Vol 1, No 1. https://bttm.org.pk/ojs/index.php/BTTN_Journal/article/view/9/22. Diakses pada tanggal 14 November 2022.
- Azam, A & Khan, A. 2022. Role of Hindu Nationalism and Its Influence on India's Political Conduct. *Pakistan Journal of International Affairs*. Vol 5, No 2. <http://pjia.com.pk/index.php/pjia/article/view/417>. Diakses pada tanggal 14 November 2022.
- Diwan, V. 2021. India-Pakistan Relations During The Modi Era. *Elementary Education Online*. Vol 20, 05. <https://www.ilkogretim-online.org/fulltext/218-1658254791.pdf>. Diakses pada 5 Juli 2023.
- Farooq, M. 2021. Rise of Hindutva in India: Effects on Pakistan-India Relations (2014-2019). <http://pr.hec.gov.pk/jspui/bitstream/123456789/18651/1/Muhammad%20Farooq%20IR%202021%20uop%20lhr.pdf>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2022.
- Gomart, M. T. 2002. La relation bilatérale : un genre de l'histoire des relations Internationales. In: *Matériaux pour l'histoire de notre temps*. Hal 65-68. https://www.persee.fr/doc/mat_0769-3206_2002_num_65_1_403316#:~:text=en%20la%20mati%C3%A8re,-.Une%20pratique%20diplomatique,souhaitent%20entretenir%20des%20liens%20durables. (Diakses pada 04 Desember 2022).
- Hussain, Ejaz. 2019. India-Pakistan Relations: Challenges and Opportunities. *Journal of Asian Security and International Affairs*. Vol 6, No 1. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2347797018823964>. Diakses pada 24 Juni 2022.
- Hussain, Shabir., dkk. 2019. Hate Crimes against Muslims and Increasing Islamophobia in India. *Journal of Indian Studies*. Vol 5, No1. https://www.researchgate.net/publication/339933508_Hate_Crimes_against_Muslims_and_Increasing_Islamophobia_in_India. Diakses pada 25 Juni 2022.
- Leidig, E. 2020. Hindutva as a variant of right-wing extremism. *Patterns of Prejudice*, 54:3. 215-237. DOI: 10.1080/0031322X.2020.1759861. <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/0031322X.2020.1759861?needAccess=true&role=button>. Diakses pada 11 Mei 2023.
- Kalimullah & Mahmood, A. 2019. Role Of Hindutva And Pragmatism In Modi's Foreign Policy Towards Pakistan. *Journal of Contemporary Studie*. Vol VIII, No 2. <https://jcs.ndu.edu.pk/site/article/view/40>. Diakses pada 25 November 2022.
- Khalik, Pratama. 2021. Pengaruh Nilai Hindutva dalam Kebijakan Luar Negeri India Terhadap Status Kashmir Era Kepemimpinan Narendra Modi. *Universitas Gadjah Mada*. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/197932>. Diakses pada tanggal 25 April 2023.
- Kinnvall, C. 2019. Populisme, ketidakamanan ontologis dan Hindutva: Modi dan maskulinisasi politik India. *Cambridge Review of International Affairs*.

- Volume 32, 3, 283-302.
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09557571.2019.1588851>.
 Diakses pada 19 Juni 2023.
- Malji, Andrea. 2018. The Rise of Hindu Nationalism and Its Regional and Global Ramification. *Association for Asian Studies*. Vol 23. No 1. <https://www.asianstudies.org/publications/ea/archives/the-rise-of-hindu-nationalism-and-its-regional-and-global-ramifications/>. Diakses pada tanggal 05 Februari 2023.
- Mastoor, M. 2021. Why India Wishes to Destabilize Pakistan?. *Institute of Regional Studies, Islamabad*. <http://irs.org.pk/Spotlight/SP12021.pdf>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2023.
- OHCHR. 2020. Islamophobia in Three Asian Contexts: India, Myanmar and China. *Justice for All Analysis for OHCHR*. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Religion/Islamophobia-AntiMuslim/Civil%2520Society%2520or%2520Individuals/JusticeForAll.pdf&ved=2ahUKEwjirKusxNT4AhU_R2wGHUtWCXAQFnoECAMQAQ&usq=AOvVaw0qTpEnDcIUuKuA3FTMGwdP. Diakses pada 30 Juni 2022.
- Ramachandran, Sudha. 2020. Hindutva Violence in India: Trends and Implications. *JSTOR: Counter Terrorist Trends and Analyses*. Vol. 12. No 2. <https://www.jstor.org/stable/26918077>. Diakses pada tanggal 17 Maret 2023.
- Siddiqui, Kalim. 2017. Hindutva, Neoliberalism and Reinventing of India. *Journal of Economic and Social Thought*. Vol 4. No 2. https://www.researchgate.net/publication/318589387_Hindutva_Neoliberalism_and_Reinventing_of_India. Diakses pada tanggal 05 Mei 2023.
- Shani, Giorgio. 2021. Towards a Hindu Rashtra: Hindutva, Religion, and Nationalism in India. *Religion, State & Society*, Vol 49. No 3. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09637494.2021.1947731>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2023.
- Sharma, Arvind. 2020. On the Difference Between Hinduism and Hindutva. *Association for Asian Studies*. Vol 25. No 1. <https://www.asianstudies.org/publications/ea/archives/on-the-difference-between-hinduism-and-hindutva/>. Diakses pada tanggal 27 April 2023.
- Sikander, M. U. H. A.,. 2021. Islamophobia in India. *Journal of The Contemporary Study of Islam*. Vol 2, No 2. <https://contemporarystudyofislam.org/index.php/jcsi/article/view/66>. Diakses pada 24 Juni 2022.
- Truschke, A. 2020. Hindutva's Dangerous Rewriting of History. *South Asia Multidisciplinary Academic Journal*, 24/25. <http://journals.openedition.org/samaj/6636>. Diakses pada 9 Mei 2023.
- Werleman, CJ. 2021. Rising Violence against Muslims in India Under Modi and BJP Rule. *Insight Turkey*. Vol. 23. No 2. <https://www.insightturkey.com/commentaries/rising-violence-against-muslims-in-india-under-modi-and-bjp-rule>. Diakses pada tanggal 1 Mei

2023.

Website:

- ACLED. 2017. Hubungan India-Pakistan. <https://acleddata.com/2017/02/07/india-pakistan-relations/>. Diakses pada 4 Agustus 2023.
- Aljazeera. 2019. Timeline: India-Pakistan relations. <https://www.aljazeera.com/news/2019/3/1/timeline-india-pakistan-relations>. Diakses pada 9 Mei 2023.
- Aljazeera. 2022. Has India's Kashmir policy under Modi failed?. <https://www.aljazeera.com/news/2022/6/15/has-india-kashmir-policy-under-modi-failed>. Diakses pada 29 Juli 2023.
- Aljazeera. 2022. In Kashmir, India's home minister says no to talks with Pakistan. <https://www.aljazeera.com/news/2022/10/5/in-kashmir-indias-home-minister-says-no-talks-with-pakistan>. Diakses pada 29 Juli 2023.
- Arabnews. 2023. Pakistan expresses concern over Indian politician's statement about BJP's involvement in Gujarat riots. <https://www.arabnews.pk/simpul/2207091/pakistan>. Diakses pada 22 Agustus 2023.
- Blakemore, E. 2019. The Kashmir conflict: How did it start?. *National Geographic*. <https://www.nationalgeographic.com/culture/article/kashmir-conflict-how-did-it-start>. Diakses pada 9 Mei 2023.
- Blank, J. 2019. How Hinduism Became a Political Weapon in India. *The Atlantic*. <https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/05/hindu-nationalism-narendra-modi-india-election/590053/>. Diakses pada 17 Juni 2023.
- BBC. 2015. Daging sapi dilarang, Muslim di Kashmir protes. https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/09/150911_majalah_sapi_kashmir. Diakses pada 27 Juli 2023.
- BBC. 2016. Kashmir attack: India 'Launches Strikes against Militants' <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-37504308>. Diakses pada 4 Juli 2023.
- BBC. 2019. Article 370: What happened with Kashmir and why it matters. <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49234708>. Diakses pada 4 Juli 2023.
- BBC. 2019. Citizenship Amendment Bill: India's new 'anti-Muslim' law explained. <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50670393>. Diakses pada 29 Juni 2023.
- BBC. 2020. 'Jihad cinta': Undang-undang yang mengancam cinta lintas agama di India. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-55225769>. Diakses pada 29 Juni 2023.
- Center for Arms Control And Non-Proliferation. 2019. History of Conflict in India and Pakistan. <https://armscontrolcenter.org/history-of-conflict-in>

- [india-and-pakistan/](#). Diakses pada 9 Mei 2023.
- Center for Preventive Action. 2023. Conflict Between India and Pakistan. *CFR*. <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-between-india-and-pakistan>. Diakses pada 3 Juli 2023.
- CNBC Indonesia. 2019. India Tsunami Demo Karena UU Anti Muslim, PM Modi Buka Suara. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191223075519-4-125078/india-tsunami-demo-karena-uu-anti-muslim-pm-modi-buka-suara>. Diakses pada 3 Agustus 2023.
- CNN. 2015. Indian Prime Minister makes surprise visit, meets with Pakistani counterpart. <https://edition.cnn.com/2015/12/25/asia/india-pm-visits-pakistan/index.html>. Diakses pada 3 Juli 2023.
- CNN. 2016. Soldiers killed in army base attack in Indian-administered Kashmir. <https://edition.cnn.com/2016/09/18/asia/india-kashmir-attack/>. Diakses pada 3 Juli 2023.
- CNN Indonesia. 2015. Daging sapi dilarang, Muslim di Kashmir protes. https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/09/150911_majalah_sapi_kashmir. Diakses pada 4 Agustus 2023.
- CNN Indonesia, 2019. Riwayat Konflik Pakistan dan India di Tanah Kashmir. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190226174438-113-372809/riwayat-konflik-pakistan-dan-india-di-tanah-kashmir>. Diakses pada 9 Mei 2023.
- CNN Indonesia. 2022. Deret Insiden Umat Hindu-Muslim hingga Kebijakan Bias Islam di India. <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/internasional/20220209130956-113-756965/deret-insiden-umat-hindu-muslim-hingga-kebijakan-bias-islam-di-india/amp>. Diakses pada tanggal 03 Mei 2023.
- Danziger, S. 2020. Dividing Lines: What India's Hindu Nationalist Turn Portends for Relations with Pakistan. *South Asian Voices*. <https://southasianvoices.org/dividing-lines-what-indias-hindu-nationalist-turn-portends-for-relations-with-pakistan/>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2022.
- Dawn. 2023. Minister concerned over rising anti-Pakistan sentiments in India. <https://www.dawn.com/news/1214160>. Diakses pada 4 Agustus 2023.
- Dawn. 2015. Shiv Sena assaults Kasuri's host in Mumbai. <https://www.dawn.com/news/1212646>. Diakses pada 04 Agustus 2022.
- Dawn. 2019. 44 Indian security personnel killed in held Kashmir attack. <https://www.dawn.com/news/1463946>. Diakses pada 4 Juli 2023.
- Duzgun, A. N., 2022. Historical roots of Hindutva. *AA Analysis*. <https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-historical-roots-of-hindutva/2642253#>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2023.
- EFSAS. 2019. Indo-Pak Relations. <https://www.efsas.org/topics/indo-pak-relations.html>. Diakses pada 24 Juni 2022.
- High Commission of India. 2019. India-Pakistan Relations. <https://www.india.org.pk/pages.php?id=16>. Diakses pada 2 Juli 2023.
- High Commission of India. 2023. Important Agreements. Diakses pada 9 Mei

- 2023.
- Human Right Watch. 2017. World Report 2017: India. <https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/india>. Diakses pada 25 Juni 2022.
- Human Right Watch. 2019. India: Vigilante ‘Cow Protection’ Groups Attack Minorities. <https://www.hrw.org/news/2019/02/19/india-vigilante-cow-protection-groups-attack-minorities>. Diakses pada 4 Agustus 2023.
- Human Right Watch. 2020. “Shoot the Traitors” Discrimination Against Muslims under India’s New Citizenship Policy. <https://www.hrw.org/report/2020/04/10/shoot-traitors/discrimination-against-muslims-under-indias-new-citizenship-policy>. Diakses pada 23 Juni 2023.
- Human Right Watch. 2022. Human Right Watch Submission to the Universal Periodic Review of India. <https://www.hrw.org/news/2022/03/31/human-rights-watch-submission-universal-periodic-review-india>. Diakses pada 25 Juni 2022.
- IIS. 2023. The Politics of Hindutva in India. <https://www.iiss.org/publications/strategic-comments/2020/hindutva-politics-india>. Diakses pada tanggal 29 April 2023.
- Iqbal, K. 2021. The Rise of Hindutva: A Global Perspective. <https://www.hilal.gov.pk/eng-article/detail/NTMzNg==.html>. Diakses pada tanggal 22 November 2022.
- Krishnan, Murali. 2022. How Hindu Nationalism Overshadows Secularism. *Deutsche Welle* (DW). <https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/en/india-at-75-how-hindu-nationalism-overshadows-the-promise-of-secularism/a-62790754>. Diakses pada tanggal 01 Mei 2023.
- Krishnan, Murali. 2022. India: Is ‘Hindutva’ a Civilizational Principle?. *Deutsche Welle* (DW). <https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/en/india-is-the-ruling-bjps-hindutva-approach-a-civilizational-principle/a-60835665>. Diakses pada tanggal 03 Mei 2023.
- Leeza, K. 2020. Is Hindutva Ideology Contributing To The India-Pakistan Conflict?. *9Dashline*. <https://www.9dashline.com/article/is-hindutva-ideology-contributing-to-india-pakistan-conflict>. Diakses pada 30 Juni 2023.
- Maizland, L. 2022. India’s Muslims: An Increasingly Marginalized Population. *Council on Foreign relation*. <https://www.cfr.org/background/india-muslims-marginalized-population-bjp-modi#chapter-title-0-8>. Diakses pada tanggal 27 Juni 2023.
- Ministry of Foreign Affairs Government of Pakistan. 2020. Pakistan rejects Indian Leadership’s anti-Pakistan rhetoric. <https://mofa.gov.pk/pakistan-rejects-indian-leaderships-anti-pakistan-rhetoric/>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2023.
- National Herald. 2019. In Last Ten Years, 91% of Hate Crimes Under Modi Govt, Reports Fact Checker.

- <https://www.google.com/amp/s/www.nationalheraldindia.com/amp/story/india/in-last-ten-years-91-of-hate-crimes-under-modi-govt-reports-fact-checker>. Diakses pada tanggal 05 Mei 2023.
- Rhude, K. 2018. Destruction of Ayodhya Mosque. *Harvard Divinity School*. <https://rpl.hds.harvard.edu/religion-context/case-studies/violence-peace/destruction-ayodhya-mosque>. Diakses pada 22 Agustus 2023.
- SASAC. 2021. What is Hinduvta?. <https://www.hindutvahrassmentfieldmanual.org/defininghindutva>. Diakses pada 29 April 2023.
- The Diplomat. 2019. The Pakistan Factor in the 2019 Indian General Elections. <https://thediplomat.com/2019/01/the-pakistan-factor-in-the-2019-indian-general-elections/>. Diakses pada tanggal 05 Agustus 2023.
- The Economic Times. 2022. Indi-Pak Ties Witness New Low in 2022; FM Bilawal's 'Uncivilised' Outburst Dashes Hope for Resumption of Early Engagements. https://www.google.com/amp/s/m.economictimes.com/news/india/indopak-ties-witness-new-low-in-2022-fm-bilawals-uncivilised-outburst-dashes-hope-for-resumption-of-early-engagements/amp_articleshow/96446446.cms. Diakses pada 04 Juli 2023.
- The Guardian. 2013. Indian and Pakistani PMs meet in New York in shadow of Kashmir violence. <https://www.theguardian.com/world/2013/sep/29/india-pakistan-meeting-new-york-unga-kashmir>. Diakses pada 9 Mei 2023.
- The Guardian. 2022. What is Hindu Nationalism and How Does it Relate to Trouble in Leicester?. <https://www.theguardian.com/world/2022/sep/20/what-is-hindu-nationalism-and-who-are-the-rss>. Diakses pada 09 Februari 2023.
- The Indian Express. 2015. PM Modi lands in Lahore on a surprise visit, meets Pak PM Nawaz Sharif. <https://indianexpress.com/article/india/india-news-india/pm-modi-lands-in-lahore-on-a-surprise-visit-meets-pak-pm-nawaz-sharif/>. Diakses pada 3 Juli 2023.
- The Times of India. 2023. 2002 Gujarat Riots. <https://timesofindia.indiatimes.com/miscellaneous/2002-gujarat-riots/articleshow/60732493.cms?from=mdr>. Diakses pada 22 Agustus 2023.
- The Wire. 2021. Book Excerpt: The Many Anti-Muslim Laws Brought in By the Modi Government. <https://thewire.in/politics/price-of-the-modi-years-book-excerpt>. Diakses pada 23 Juni 2023.
- Vaishnav, M. 2019. The BJP in Power: Indian Democracy and Religious Nationalism. <https://carnegieendowment.org/2019/04/04/bjp-in-power-indian-democracy-and-religious-nationalism-pub-78677>. Diakses pada 23 September 2023.